

BUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi

Edisi 02

Volume 12/April 2025
www.imigrasi.go.id/majalah
Majalah Media Keimigrasian



TETAP BERDAYA MENJAGA NEGERI

Tantangan dari wilayah barat hingga timur Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kesejahteraan petugas, dan menghadirkan layanan imigrasi di seluruh penjuru Indonesia.



Layanan Paspor



Syarat

1. Kartu tanda penduduk (KTP)
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta kelahiran/akta perkawinan/buku nikah/ijazah/surat baptis

Biaya

Pelayanan percepatan paspor	Rp1.000.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 5 tahun	Rp350.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 10 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun	Rp950.000

Prosedur

1. Datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melalui aplikasi M-Paspor maksimal pukul 10 pagi.
2. Isi formulir permohonan paspor serta lampirkan dokumen persyaratan.
3. Serahkan berkas permohonan paspor untuk diperiksa oleh petugas imigrasi.
4. Tunggu berkas permohonan diinput oleh petugas imigrasi.
5. Ikuti proses foto dan wawancara.
6. Lakukan pembayaran di bank.
7. Dapatkan paspor yang telah diterbitkan.

Silakan **hubungi kantor imigrasi** terdekat untuk informasi lebih lanjut



TETAP BERDAYA MENJAGA NEGERI

Edisi kedua majalah keimigrasian *BhumiPura* tahun ini hadir dengan tema “Tetap Berdaya Menjaga Negeri”. Tema ini kami angkat sebagai bentuk apresiasi kepada semua insan imigrasi di seluruh penjuru Nusantara.

Pada edisi kali ini, kami menyajikan beragam rubrik yang merangkul dinamika terkini dunia keimigrasian. *Laporan Utama* mengupas dukungan Komisi XIII DPR RI terhadap pemberian tunjangan khusus bagi petugas imigrasi di wilayah terluar RI. Terdapat pula *Liputan Khusus* yang berisi wawancara gabungan dengan petugas imigrasi yang bertugas di garis depan perbatasan.

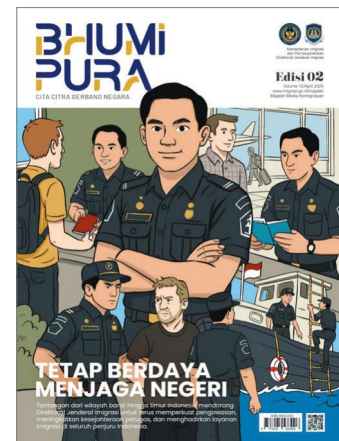
Lalu, rubrik *Kebijakan* hadir dengan informasi terkini mengenai paspor elektronik polikarbonat dan akselerasi layanan pendaftaran penjamin untuk visa RI. Sementara itu, rubrik *Kerja Kita* membahas implementasi aplikasi pengawasan orang asing, upaya penegakan hukum di Kantor Imigrasi Tanjung Uban, serta rangkaian Operasi Wira Waspada perdana 2025. Laporan mengenai tindakan Imigrasi terhadap perusahaan asing bermasalah dan keberhasilan menciduk DPO pemerintah Tiongkok pun turut melengkapi.

Kilas Peristiwa menyajikan rangkuman sinergi Indonesia-Australia dalam memperkuat keamanan perbatasan Bali, pergantian Plt. Dirjen Imigrasi, peresmian Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkang di Batam, hingga pengakuan dunia atas layanan Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pada rubrik *Opini*, Sahabat Mido diajak untuk merenungkan rumah detensi imigrasi yang ideal dan berbasis HAM serta mengeksplorasi potensi Morotai. *Pojok Komunikasi* membahas kaitan foto profil dengan kepribadian. Sementara itu, *Renjana* akan membawa Sahabat Mido menikmati romantisnya pesona Jakarta.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan edisi ini. Semoga majalah keimigrasian *BhumiPura* dapat terus menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi seluruh insan imigrasi dan masyarakat.

Selamat membaca, Sahabat Mido!



cerita sampul

Di tengah impitan efisiensi anggaran, petugas imigrasi tetap sekuat tenaga menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian, serta menjadi fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat.

PENGARAH

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin Sukmajatnika, Elyan Nadian Zahara, Eka Safitri, Fipit Fatimah, Habil Ashari, Irdadika Natasia Tiominar, Mayza Fairda, Riski Amalia, Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPUL

Gezkkii

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Tim Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

majalah.bhumpura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

DARI REDAKSI

3. Tetap Berdaya Menjaga Negeri

LAPORAN UTAMA

8. Isu Aktual Keimigrasian dari Barat ke Timur Berkumandang di Senayan

LIPUTAN KHUSUS

12. Dari Atambua dan Merauke: Kisah Para Penjaga Garis Kedaulatan

KEBIJAKAN

14. Paspor Elektronik Polikarbonat: Dari Ketahanan hingga Keamanan

15. Akselerasi Layanan Daring: Verifikasi Akun Penjamin Kini Mulai dari Satuan Kerja

KERJA KITA

16. Libatkan Pengelola Penginapan: Keberadaan Tamu Asing Wajib Didaftarkan via APOA

17. Menyaru sebagai Nelayan, 5 WNI Pelaku Penyelundupan Manusia Ditangkap

18. Imigrasi Gelar Operasi Wira Waspada Perdana pada 2025

20. Operasi Wira Waspada di Batam: Imigrasi Periksa 12 Perusahaan PMA Bermasalah

22. Imigrasi Berhasil Ciduk 2 Orang DPO Pemerintah Tiongkok

23. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Pria Rusuh dari AS

24. Kompilasi Gakkum

KILAS PERISTIWA

26. Pelatihan Menghadapi Kejahatan Transnasional: Sinergi Indonesia-Australia Memperkuat Keamanan Wilayah Bali

27. Saffar M. Godam Pamit, Yuldi Yusman Gantikan sebagai Plt. Dirjen Imigrasi

28. Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu Resmi Beroperasi: Diharapkan Pacu Ekonomi Nasional

29. Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Masuk 10 Besar Terbaik Dunia

38. Pojokomunikasi

Satu Pengguna, Foto Beraneka: Di Balik Pemilihan Foto Profil Media Sosial



URUS PASPOR CEPAT, SATSET, DAN BISA SAMBIL NGE-MALL DI *Immigration Lounge*

Tersedia di **7 Mal Besar** di Indonesia

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**
(permohonan baru dan penggantian paspor)

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3, Lantai B2**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Mall Taman Angrek, Lantai LG**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Senayan City, Lantai 6**
Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall, Bekasi**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Pesona Square Mall Depok, Lantai 3**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
- **Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4**
Senin-Kamis pukul 10.00-18.00 WIB
Jumat pukul 10.00-18.30 WIB

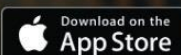
Biaya

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun
Rp650.000
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun
Rp950.000
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**

Ajukan permohonan
dan daftar melalui

Aplikasi M-Paspor

Unduh sekarang di





30. Tangkis Perdagangan Orang: Imigrasi Meulaboh Bentuk Desa Binaan

INFORMATIPS

32. Layanan Imigrasi untuk Anak: Hal yang Harus Anda Ketahui

OPINI

34. Rumah Detensi Imigrasi yang Ideal dan Berbasis HAM: Sebuah Refleksi
36. Morotai dan Keamanan Nasional: Mengungkap Tantangan Keimigrasian di Perbatasan Indonesia Timur

POJOKKOMUNIKASI

38. Satu Pengguna, Foto Beraneka: Di Balik Pemilihan Foto Profil Media Sosial

RENJANA

40. Romantisasi Pesona Jakarta dengan Tur Bus Beratap Terbuka

INFOGRAFIK

42. Transformasi Logo Imigrasi
43. Penerapan Paspor Elektronik di Seluruh Indonesia

KABAR DARI SEBERANG

44. Riang Media Beijing: Promosi Peluang Investasi Indonesia
45. Indonesia Soroti Implementasi ABTC Virtual di APEC SOM 1 2025 Korea Selatan

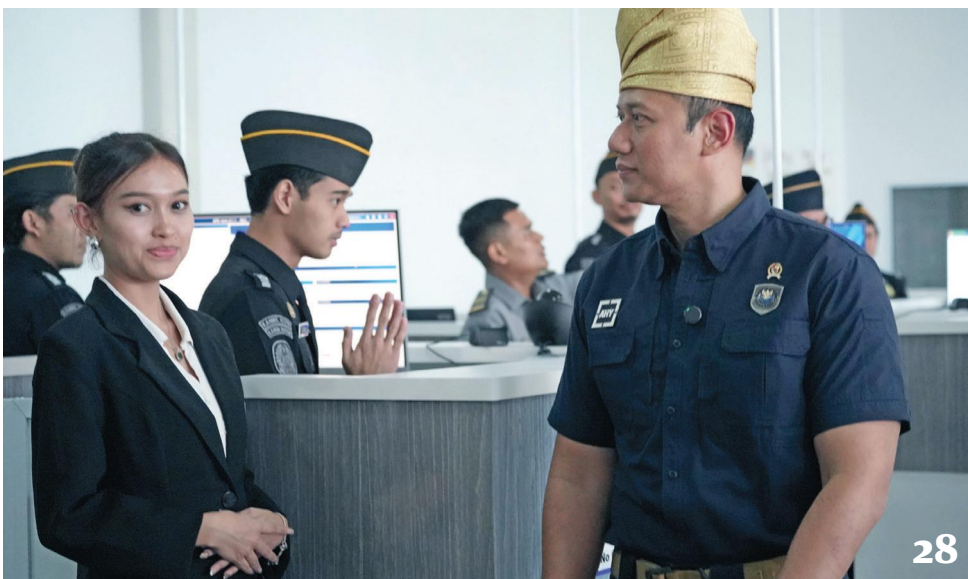
KATA MEREKA

46. Autogate Indonesia: Apa Kata Mereka?

RESENSI

48. 5 Langkah Praktis Menemukan Versi Terbaik Dirimu

49. MATA LENSA 50. KOMIK



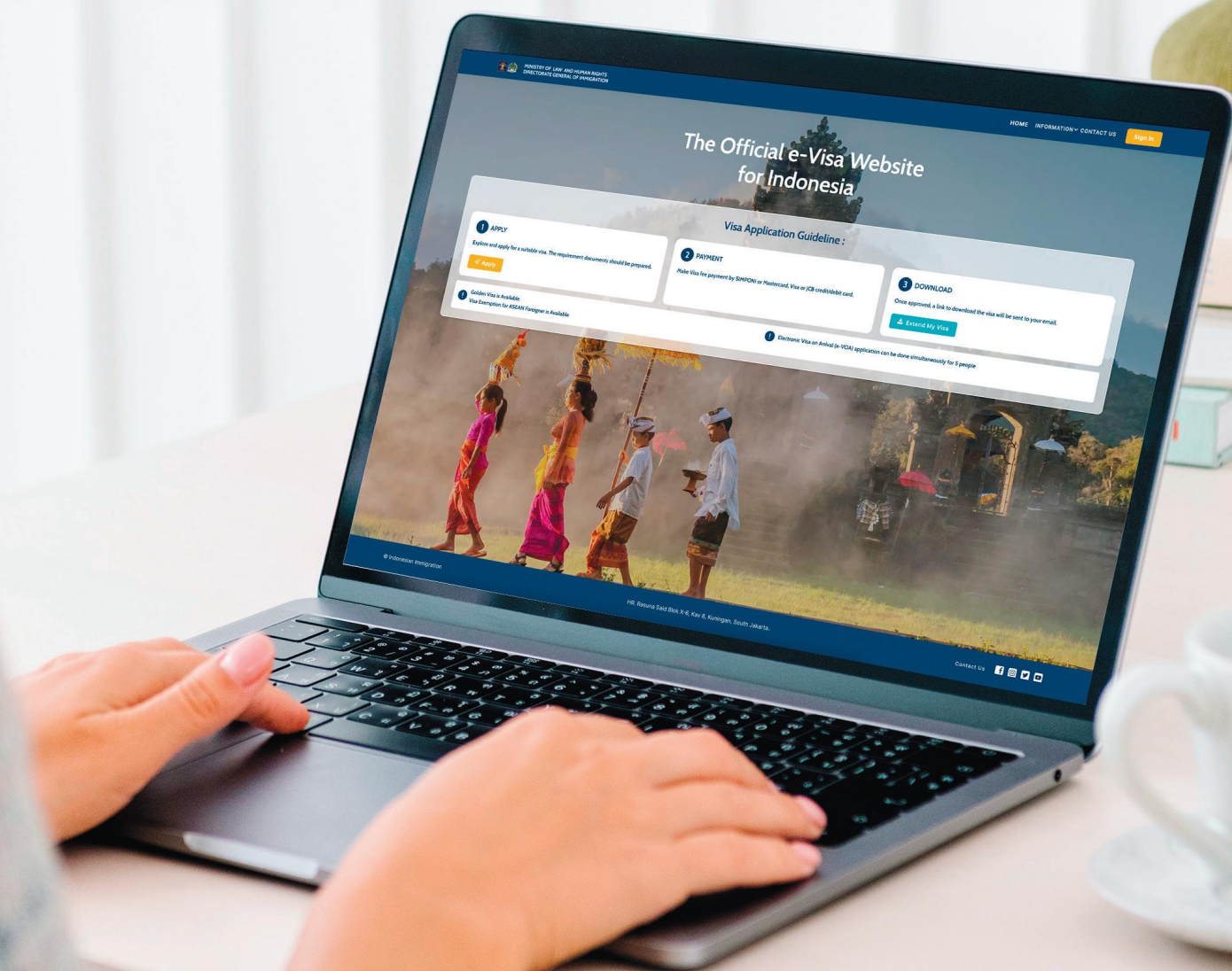
BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Now, you can apply for
electronic visa on arrival (e-VOA),
visitor visa for tourism, and e-VOA extension

through **evisa.imigrasi.go.id**

Access now and experience the convenience!



Isu Aktual Keimigrasian dari Barat ke Timur

BERKUMANDANG DI SENAYAN

Rapat Dengar Pendapat diadakan antara Ditjen Imigrasi dan Komisi XIII DPR RI untuk membahas berbagai tantangan keimigrasian dari wilayah barat dan timur Indonesia. Dari diskusi ini, Ditjen Imigrasi berharap untuk diberikan ruang demi menyejahterakan petugas imigrasi dan memenuhi kebutuhan operasional untuk bekerja di medan yang sulit.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara



"Kami menjadi tahu secara detail masalah [keimigrasian] di daerah. Bapak sekalianlah yang menjadi pejuang yang ada di garda terdepan untuk kedaulatan Indonesia." – Dewi Asmara, pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR RI.

Diskusi intens dan interaktif menguar dari ruang rapat Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta selama dua hari penuh. Di sanalah Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, jajaran direksi, serta kepala kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi se-Indonesia membahas isu-isu aktual keimigrasian bersama Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Plt. Dirjen Imigrasi bersama jajaran direksi dan kakanwil menghadiri RDP dengan Komisi XIII DPR RI. (Foto: Tommy Ariyanto)



Kabar dari Barat

Dari wilayah barat, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh Novianto Sulastono menjabarkan kondisi riil pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada tiap-tiap kantor wilayah.

Penegakan hukum keimigrasian di wilayah barat mencapai 2.908 tindakan administratif keimigrasian (TAK) pada 2024. Hingga awal 2025, wilayah barat mencatat 75 kasus pro justisia atau tindak pidana keimigrasian pada 2024 dengan tambahan 16 kasus pada awal 2025.

Capaian kinerja penegakan hukum keimigrasian satuan kerja di wilayah barat pada 2024 berkontribusi sebesar 62,3% dan 64,1% pro justisia terhadap capaian nasional. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingginya jumlah arus masuk orang asing melalui bandara dan pelabuhan internasional yang sebagian besar berada di Jawa dan Sumatra. Pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang terkonsentrasi di wilayah barat juga menarik lebih banyak orang asing untuk masuk dan menetap.

Dari data perlintasan warga negara asing (WNA) di wilayah barat, terdapat lima tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dengan volume perlintasan tertinggi: Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Tangerang), Pelabuhan Batam Center (Batam), Bandara Internasional Juanda (Surabaya), Bandara Internasional Kualanamu (Medan), dan Pelabuhan Citra Tritunas (Batam).

Lalu untuk mencegah tindak pidana perdagangan manusia, Imigrasi menginisiasi Desa Binaan Imigrasi (DBI) di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia (PMI). Hingga saat ini, 140 dari 179 DBI berada di wilayah barat. Kanwil Kepulauan Riau merupakan kantor wilayah dengan DBI terbanyak, yaitu berjumlah 70 desa. Banyaknya wilayah yang menjadi kantong PMI

"DENGAN WILAYAH KERJA YANG MENCAKUP GARIS PANTAI SEPANJANG 108.000 KILOMETER DAN LEBIH DARI 17.000 PULAU, KAMI MENYADARI BETAPA MENANTANGNYA TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN YANG KAMI EMBAN."

mengimplikasikan tingginya kebutuhan akan pengawasan keimigrasian.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangan. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Godam.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas.

"Wilayah kerja kami sangat luas, dengan panjang perbatasan mencapai 966 kilometer. Ini karena Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur, yang menjadikannya wilayah yang strategis," jelas Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat Haryono Agus.

Sementara itu, di Aceh, Novianto menyebutkan, pada akhir Desember 2024, terjadi demonstrasi dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat terkait keberadaan pengungsi Rohingya. Demonstrasi ini dipicu oleh beberapa hal. *Pertama*, kekhawatiran masyarakat Aceh karena ada beberapa pengungsi yang perilakunya tidak sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, indikasi adanya pihak tertentu yang menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian tentang pengungsi Rohingya sehingga memperburuk sentimen negatif di kalangan masyarakat Aceh.

"Kami menilai, permasalahan pengungsi ini memerlukan kebijakan yang lebih tegas. Meskipun sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 sebagai pedoman penanganan pengungsi, perlu ada penegasan lebih lanjut mengenai pembagian tugas yang jelas, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta kejelasan anggaran untuk penanganan pengungsi," tutur Novianto.

Isu dari Wilayah Timur

Sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan di kantor imigrasi di wilayah Indonesia tengah dan timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkoba, dan terorisme.

Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko

Potret PLBN Skouw di Jayapura, Papua (Sumber: djkn.kemenkeu.go.id)



pelanggaran keimigrasian, serta mengancam ketertiban umum.

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantang tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia,” ujar Godam.

Godam juga mengemukakan kondisi lainnya, seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian.

“Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan. Selain itu, tidak dimungkiri adanya ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang turut menghambat operasional

kantor imigrasi di wilayah tersebut,” sambung Godam.

Stateless, Undocumented Person, dan Konflik Sosial

Secara khusus, Komisi XIII meminta Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Timur, yang juga meliputi Kalimantan Utara, untuk mengawasi status keimigrasian suku Bajo (manusia perahu) yang menetap di perairan Kabupaten Berau yang tidak memiliki kewarganegaraan, dengan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

“Yang menjadi perhatian khusus adalah keberadaan suku Bajo. Mereka ini *stateless*, artinya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Situasi ini sangat memprihatinkan. Ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi orang Indonesia, khususnya suku Bajo, yang terlantar dan tidak memiliki status kewarganegaraan,” ujar Kepala Kanwil Imigrasi Kalimantan Timur Syahrioma Delavino.

Dalam upaya menyelesaikan masalah *undocumented person*, Komisi XIII mendorong kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Filipina melalui Konsulat Jenderal Republik

Indonesia (KJRI) di Filipina.

Undocumented person yang disebut Filipina-Sanger di wilayah Sulawesi Utara dipengaruhi oleh faktor historis, geografis, sosial, dan ekonomi; kedekatan wilayah; serta hubungan kekerabatan antara masyarakat Sangehe dan Filipina. Hal ini menyebabkan mobilitas penduduk yang tinggi dan kerap tanpa dokumen resmi.

Faktor ekonomi juga mendorong banyak warga negara (WN) Filipina untuk mencari nafkah di sektor perikanan dan perdagangan di wilayah perbatasan tanpa melalui rute dan prosedur keimigrasian yang sah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen perjalanan, terbatasnya akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau memperumit penanganan masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Filipina serta pendekatan berbasis komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan kesadaran dan mempermudah legalitas status mereka.

“Pada 8 Agustus 2024, telah terdata sebanyak 344 masyarakat *undocumented person* dari kecamatan

di wilayah Kota Bitung. Hasil pendataan sudah dikirim ke Konjen Filipina untuk dilakukan verifikasi kewarganegaraan. Namun, hingga saat ini hasil verifikasinya belum kami terima,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani.

Tidak jauh berbeda di Provinsi Maluku Utara, otoritas Imigrasi menemukan kasus WN Filipina yang telah berketurunan dan tinggal lama tanpa dokumen, khususnya di Halmahera Utara. Ditemukan juga kasus perlintasan ilegal yang membawa barang-barang berbahaya, seperti narkoba, senjata api, dan bahan peledak di Kepulauan Morotai.

Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara Ian Fidhianto Markos menyatakan, terdapat 10 WN Filipina yang tidak memiliki dokumen dan sudah diproses. Ada pula konflik sosial di masyarakat sekitar Halmahera Timur. Warga lokal berharap agar pekerjaan tenaga kerja asing (TKA) dapat dikurangi dan digantikan oleh warga lokal.

“Kami juga sedang mendalami adanya dugaan LSM asing yang menggunakan visa kunjungan untuk melakukan kegiatan di daerah Maluku Utara. Mereka ditengarai terlibat dalam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan,” papar Fidhianto.

Atensi dan Dukungan dari Komisi XIII Menanggapi Ditjen Imigrasi. Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR Dewi Asmara menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi



Petugas imigrasi menempuh medan yang sulit untuk sampai ke PLBT Bantan di Entikong, Kalimantan Barat. (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

yang mendukung optimalisasi kinerja petugas imigrasi.

“Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik tetapi tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pemberian tunjangan kinerja,” tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur. Komisi XIII juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak keamanan

dan Kementerian Luar Negeri dalam memperketat pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dari Myanmar, Bangladesh, Afghanistan, dan Iran.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meninjau kembali perjanjian *border crossing agreement* dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini karena sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dilakukan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 63 Tahun 2024.

Komisi XIII juga mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk menempatkan personel keimigrasian di pos-pos perlintasan batas negara serta membentuk dan mengadakan kanwil Ditjen Imigrasi di Provinsi Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan provinsi lain yang belum memiliki kanwil Imigrasi. Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diharapkan mengevaluasi secara berkala data pemberian izin tinggal kepada WNA yang telah mengunjungi Indonesia berkali-kali.

“Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu, [semoga] keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Godam. ■

“KOMISI XIII DPR RI MENDORONG IMIGRASI AGAR MELAYANI DENGAN BAIK TETAPI TETAP TEGAS, MENINGKATKAN PENGAWASAN DI WILAYAH WISATA, INDUSTRI, DAN PERTAMBANGAN AGAR TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN VISA.”

Potret Pos Imigrasi Haumeniana (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)



Dari Atambua dan Merauke:

KISAH PARA PENJAGA GARIS KEDAULATAN

Kecelakaan yang pernah dialami Ilham dan rekan-rekannya menjadi kisah tersendiri di tapal batas negara. Di tengah segala keterbatasan, para petugas imigrasi menemukan kekuatan dari masyarakat lokal.

■ Penulis: Irnadika Natasia Tiominar

Garis batas negara bukan sekadar tinta di atas peta. Ia adalah wilayah dinamis yang dijaga oleh para garda terdepan. Terdapat sejuta kisah para petugas imigrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di pos lintas batas negara (PLBN).

Redaksi *BhumiPura* berkesempatan menyelidik kehidupan dua insan imigrasi yang bertugas jauh dari hiruk pikuk di jantung perbatasan darat Indonesia: Ilham Prayuda dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan Yusuf

Raubaba dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.

Ikatan Tak Terputus di Perbatasan Atambua

Bagi Ilham Prayuda, menjaga empat PLBN dan empat pos tradisional di perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah pengalaman yang unik. Lima tahun sudah ia mengabdikan diri di perbatasan Atambua, Nusa Tenggara Timur.

"Pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Atambua ini cukup unik," tuturnya. "Dulu, Timor Leste

dan Indonesia ini ibaratnya masih satu keluarga, tetapi sekarang harus terpisah. Ada warga yang lahirnya di Indonesia, tetapi kemudian menetap di wilayah yang menjadi bagian Timor Leste sehingga menjadi WNA, dan sebaliknya."

Ikatan kekeluargaan melampaui garis batas negara. Ketika ada acara adat, seperti kedukaan, mereka tetap saling mengunjungi tanpa merasa terpisah oleh status kewarganegaraan.

Pendekatan persuasif dan pemahaman akan konteks sosial budaya menjadi kunci dalam menjalankan tugas di perbatasan. Ilham melihat warga dari kedua negara sebagai bagian dari sejarah dengan kedekatan emosional yang sulit dipisahkan.

Tugas di Atambua menyimpan tantangan tersendiri. Jarak tempuh

PLBN Wini yang berbatasan dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)



menuju pos perbatasan yang bisa mencapai 20 kilometer dari Atambua menjadi kendala utama. Jalan berbatu yang baru diaspal pada 2023 menyimpan cerita pilu kecelakaan yang pernah dialami Ilham dan rekan-rekannya.

“Saya dan beberapa rekan pernah mengalami kecelakaan saat berkendara dari atau menuju pos perbatasan. Ada yang patah tulang, bahkan sampai ada yang tutup usia,” ungkapnya prihatin.

Keterbatasan jaringan internet juga menjadi penghambat komunikasi dan koordinasi. Tak jarang, Ilham harus mencari sinyal hingga ke tengah sawah. Sulitnya mendapatkan bahan makanan di pos-pos terpencil menambah beratnya tugas mereka.

Namun, di tengah segala keterbatasan, Ilham menemukan kekuatan dalam kehangatan dari masyarakat lokal. “Masyarakat lokal di pos perbatasan ini baik-baik sekali. Jadi, kalau kami kesulitan, mereka pasti bantu. Misalnya saat ada kendala di jalan. Mereka mau berhenti untuk bantu,” ceritanya sambil tersenyum.

Merawat Perbatasan Papua

Berpindah ribuan kilometer ke timur, Yusuf Raubaba menjaga pos perbatasan Waropko di Merauke, Papua Selatan. Pengalamannya bertugas di berbagai pos perbatasan sejak 2022 memberikannya perspektif unik tentang dinamika lintas batas di Papua.

Tantangan utama yang dihadapi Yusuf adalah pemahaman warga, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara (WN) Papua Nugini, tentang pentingnya tertib administrasi. Tak jarang ia menjumpai WNI yang hendak membuat pas lintas batas tanpa memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Kendala bahasa juga menjadi penghalang komunikasi, terutama dengan para warga Papua Nugini, ketika mereka tidak memiliki dokumen lengkap.

Sebagai putra daerah, Yusuf berupaya mengatasi kendala komunikasi dengan memberikan edukasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penjelasan tentang pentingnya dokumen keimigrasian menjadi penghubung antara aturan negara dan pemahaman masyarakat.

Kisah yang paling berkesan bagi Yusuf adalah ketika bertugas di



PLB tradisional di Atambua, Nusa Tenggara Timur (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

Mindiptanah pada 2023. Saat itu, ia harus mengarahkan sekitar 1.000 warga Papua Nugini yang hendak melakukan ibadah doa di perbatasan selama tiga hari.

“Jadi saya harus mengawasi dan mengarahkan dari kedatangan, ibadah, sampai kepulangan mereka kembali ke Papua Nugini,” kenangnya. Momen itu menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya soal administrasi, tetapi juga kemanusiaan.

Kondisi geografis Waropko juga menghadirkan tantangan. Jalan berlumpur menuju kota sering terputus saat cuaca buruk, menyulitkan akses untuk mendapatkan bahan pangan. Ketiadaan jaringan internet dan anjungan tunai mandiri (ATM) di pos makin menambah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

“Bulan Agustus tahun lalu, saya pernah benar-benar kehabisan makanan. Saat itu cuaca buruk, jadi tidak bisa ke kota. Akhirnya saya minta singkong ke kebun warga yang ada di sebelah pos perbatasan,” tutur Yusuf, menggambarkan betapa bergantungnya ia pada kebaikan masyarakat.

Efisiensi dan Harapan di Tapal Batas

Kebijakan efisiensi yang tengah berjalan pun turut dirasakan dampaknya oleh Ilham dan Yusuf. Bagi Ilham, biaya transportasi untuk mobilisasi ke pos perbatasan yang sebelumnya ditanggung negara, kini menjadi beban pribadi.

“Petugas sekarang [melakukan perjalanan] berdua [dengan] naik motor, alias berboncengan agar bisa

patungan bensin,” ungkapnya. Ilham khawatir efisiensi ini berdampak pada frekuensi sosialisasi dan pengawasan keimigrasian. Sementara bagi Yusuf, efisiensi justru membawa pengaruh positif, yaitu berkurangnya perjalanan dinas ke Merauke yang memakan waktu dan biaya besar.

Saat membahas masa depan, Ilham berharap akan adanya perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana di perbatasan. Ilham juga berharap akan adanya cuti yang lebih fleksibel dan tunjangan khusus bagi petugas di wilayah terpencil.

Senada dengan Ilham, Yusuf mengharapkan adanya bekal perlindungan diri bagi petugas, melindungi lokasi pos perbatasan yang sering berada di tengah hutan. Keduanya berharap penambahan personel dan fasilitas kendaraan dinas dapat diadakan untuk menunjang tugas yang makin kompleks.

Kisah Ilham dan Yusuf adalah sekelumit gambaran dedikasi para penjaga garis batas negara. Dalam menjalankan tugas, mereka berinteraksi dengan masyarakat, mengatasi tantangan geografis dan sosial budaya, serta menunjukkan sisi humanis dalam setiap tindakan.

Di balik cap pengawasan ketat Imigrasi, terdapat hati yang melayani, melindungi, dan memahami denyut kehidupan di tapal batas negeri. Perhatian dan dukungan dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, menjadi krusial untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas mulia ini dengan lebih baik. ■

Paspor Elektronik Polikarbonat: **DARI KETAHANAN HINGGA KEAMANAN**

Sejumlah kantor imigrasi di Indonesia sudah melayani pembuatan paspor elektronik jenis polikarbonat. Apa perbedaannya dengan paspor elektronik lembar laminasi? Simak penjelasannya berikut ini.

■ Penulis: Riski Amalia

Pembuatan paspor elektronik (e-paspor) lembar polikarbonat sudah bisa dilakukan di beberapa kantor imigrasi di Indonesia. Berbeda dengan e-paspor berlembar laminasi, e-paspor lembar polikarbonat dinilai lebih unggul dalam hal ketahanan dan keamanannya. Namun, karena bahannya yang khusus sehingga harus dicetak menggunakan pencetak (*printer*) khusus, pembuatan e-paspor berbahan polikarbonat saat ini hanya dapat dilakukan di sejumlah kantor imigrasi, seperti Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bandung, Medan, Makassar, dan Semarang.

"Ke depannya, beberapa kantor imigrasi lainnya juga akan menerbitkan paspor polikarbonat. Jadi, [ada] lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa memperoleh paspor jenis ini," jelas Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan pada Kamis (6/3).

Dengan harga yang sama (Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun dan Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun), e-paspor lembar polikarbonat memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan paspor sejenisnya yang terbuat dari lembar laminasi.

Keunggulan e-Paspor Lembar Polikarbonat

1. Lebih Tahan Lama
Lapisan pelindung yang terbuat dari polikarbonat membuat paspor jenis ini lebih kuat serta tahan terhadap suhu tinggi sehingga lebih tahan lama dan



Halaman biodata pada e-paspor polikarbonat (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

tidak mudah rusak, seperti basah atau terlipat.

2. Keamanan Tinggi
Paspor elektronik lembar polikarbonat memiliki fitur keamanan yang lebih canggih untuk melindungi identitas dan informasi pribadi pemilik paspor dari pencurian identitas serta pemalsuan paspor.

3. Verifikasi Lebih Mudah
Paspor elektronik lembar polikarbonat memungkinkan petugas keamanan untuk memverifikasi identitas dan informasi perjalanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, seperti e-paspor berbahan lembar laminasi, penggunaan e-paspor lembar polikarbonat

juga dapat memudahkan penggunaannya dalam pengurusan bebas visa di beberapa negara, seperti Jepang yang memberikan kemudahan bebas visa bagi pemegang paspor elektronik.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi secara bertahap sudah melakukan peralihan jenis terbitan paspor dari nonelektronik ke elektronik. Seluruh kantor imigrasi di Indonesia pun tengah disiapkan untuk bisa menerbitkan e-paspor karena ke depannya paspor nonelektronik tidak akan dikeluarkan lagi.

"Jadi, bagi yang ingin punya e-paspor polikarbonat, bisa langsung urus di sepuluh kantor imigrasi yang sudah ditunjuk. Jangan lupa untuk mendaftar dulu di aplikasi M-Paspor, ya," tutup Tato. ■

Akselerasi Layanan Daring: VERIFIKASI AKUN PENJAMIN KINI MULAI DARI SATUAN KERJA

Direktorat Jenderal Imigrasi terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan keimigrasian secara daring. Verifikasi permohonan akun penjamin kini mulai dari tingkat kantor imigrasi.

■ Penulis: Roro Aditya Citraningtyas Ningrum

Kantor imigrasi kini memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan akun penjamin yang diajukan oleh korporasi atau perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah kerjanya. Kewenangan ini disebutkan dalam Surat Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-253 tanggal 20 Maret 2025.

Pendaftaran akun penjamin merupakan tahapan awal dalam proses pengajuan visa bagi warga negara asing (WNA) melalui situs evisa.imigrasi.go.id. Proses aktivasi akun dilakukan paling lama tiga hari kerja sejak dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap, kecuali dalam hal diperlukan pengecekan lapangan.

Verifikasi permohonan pada tingkat kantor imigrasi dilakukan dalam tiga hari kerja. Lebih dari itu, verifikasi akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang membawahi kantor imigrasi tersebut.

Apabila terdapat keraguan pada proses verifikasi dokumen persyaratan, pengecekan lapangan dapat dilakukan untuk memastikan keabsahan data dan dokumen. Mekanisme ini dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja dan hasilnya akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. (dalam hal ini) Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

“Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan proses verifikasi akun penjamin berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mempercepat aksesibilitas layanan keimigrasian secara daring,” jelas Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan. “Melalui mekanisme yang baru, permohonan pembuatan akun penjamin akan melalui tahapan verifikasi yang lebih terstruktur sebelum dapat digunakan untuk mengajukan berbagai jenis permohonan dalam layanan keimigrasian,” sambungnya.

Sebagai ilustrasi, permohonan akun penjamin dari pemohon yang berdomisili di Jakarta Selatan dapat diverifikasi dan diputuskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta, atau bahkan Direktur Jenderal Imigrasi melalui direktur terkait. Untuk mengajukan permohonan, dokumen persyaratan adalah sebagai berikut.

A. Perseorangan WNI

1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi
2. Kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor Republik Indonesia
3. Kartu keluarga (KK), akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, atau ijazah

B. Korporasi

1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi
2. Akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhir
3. Pengesahan badan usaha
4. Profil perusahaan
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
6. Identitas pimpinan perusahaan

“Ada tiga tahap proses verifikasi akun penjamin. Yang pertama, tahap pendaftaran akun oleh pemohon, [kemudian] pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, [dan] yang terakhir persetujuan atau penolakan oleh pejabat imigrasi,” tutup Tato.

Penyesuaian kewenangan ini juga berlaku bagi perubahan data penjamin. Kepala kantor imigrasi, kepala kantor wilayah, atau direktur jenderal imigrasi dapat melakukan perubahan data penjamin sesuai dengan pengajuan korporasi atau WNI di wilayah kerjanya dengan melampirkan persyaratan yang terbaru. ■



Konter layanan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok (ilustrasi) (Sumber: depok.imigrasi.go.id)

Libatkan Pengelola Penginapan: **KEBERADAAN TAMU ASING WAJIB DIDAFTARKAN VIA APOA**

Pengawasan terhadap orang asing terus dioptimalkan. Direktorat Jenderal Imigrasi melibatkan pengelola penginapan di Indonesia melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing atau APOA.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) terbaru guna mengoptimalkan pengawasan terhadap orang asing (warga negara asing/WNA) di Indonesia. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang mempermudah para pengelola penginapan dalam pelaporan tamu asing yang menginap ataupun tinggal di tempat mereka.

"Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan. Dalam hal ini, kami menggunakan APOA sebagai platformnya. Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian data dapat diakses oleh petugas imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim) Yuldi Yusman.

Implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU No. 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh petugas imigrasi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, mereka dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Berikut ini adalah tahapan proses pelaporan via APOA yang harus dilakukan pengelola penginapan ketika ada orang asing yang *check-in* di penginapan mereka.

1. Masuk ke sistem APOA.
2. Minta paspor milik tamu dan

unggah foto halaman depan paspor tersebut, atau ambil foto secara langsung melalui aplikasi.

3. Masukkan data tamu ke dalam sistem dan lakukan verifikasi untuk memastikan keakuratannya.

Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirimkan melalui APOA.

Sementara itu, untuk tamu yang *check-out*, tahapan pelaporan yang harus dilakukan pengelola penginapan adalah sebagai berikut.

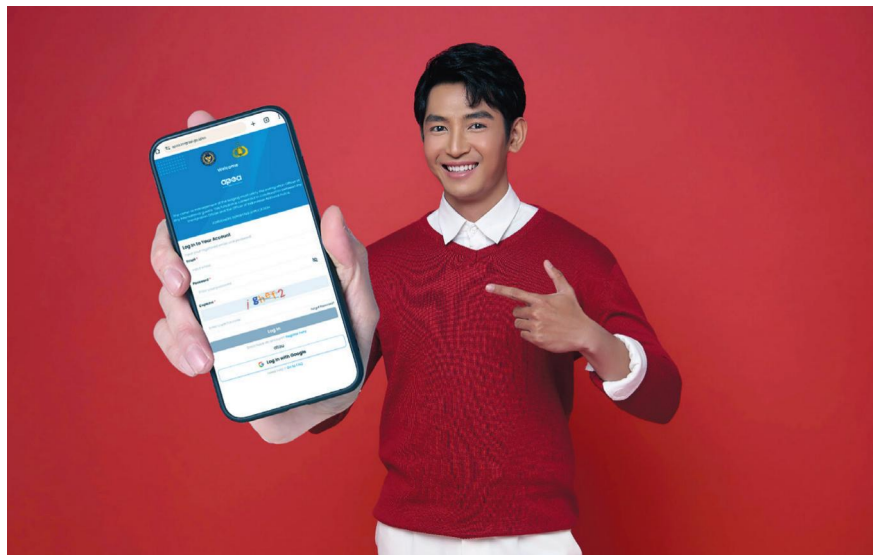
1. Masuk ke sistem APOA.
2. Pilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan.
3. Pastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang melakukan *check-out*.
4. Pilih tombol *check-out* pada aplikasi.

Laporan *check-out* tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian. Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," tambah Yuldi.

Mendukung pernyataan tersebut, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. "Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," pungkasnya. ■

Seorang pengelola penginapan menunjukkan APOA pada ponselnya (ilustrasi). (Foto: Arif Rahman Suryaman)





Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau Ujo Sujoto dan Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Uban Adi Hari Pianto menunjukkan barang bukti yang disita dari lima orang terduga pelaku penyelundupan PMI ilegal. (Sumber: batamos.com)

Menyaru sebagai Nelayan, 5 WNI PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA DITANGKAP

Petugas Pangkalan Angkatan Laut Bintan berhasil mengamankan pelaku upaya penyelundupan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam menjalankan aksi mereka, para pelaku menyaru sebagai nelayan untuk mengelabui petugas.

■ Penulis: Humas Imigrasi Tanjung Uban

Lima warga negara Indonesia (WNI) pelaku upaya penyelundupan manusia diproses hukum oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban. Sebelumnya, kelima WNI tersebut diamankan oleh petugas Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bintan di perairan Selat Riau pada tanggal 25 Februari 2025.

Dalam menjalankan aksi mereka, para pelaku menyaru sebagai nelayan setempat untuk mengelabui para petugas. Selain itu, untuk memperlancar aksi penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari Batam menuju Sungai Rengit, Malaysia, dan sebaliknya, mereka membagi diri

dalam tiga tim yang menggunakan *speed boat* berbeda.

Tim pertama, MN, bertindak sebagai tekong penyelundup, perekrut, dan penyusun rencana pengantaran PMI nonprosedural. Ia juga bertanggung jawab dalam penjemputan dari Sungai Rengit, Malaysia, menuju Jembatan I Bareleng, Batam. Kemudian tim kedua yang terdiri atas IN (tekong pelacak merangkap mata-mata) dan HM (anak buah kapal [ABK] pelacak merangkap mata-mata) bertugas untuk memantau situasi sekitar perairan Sakera, Tanjung Uban, serta memberikan informasi kepada MN jika terdapat kendala atau petugas yang sedang berpatroli di wilayah tersebut.

Sementara itu, tim ketiga yang terdiri atas RO (tekong pelacak merangkap mata-mata) dan APL (ABK pelacak merangkap mata-mata) bertugas memantau situasi perairan Selat Riau serta memberikan informasi kepada MN jika terdapat kendala atau petugas yang sedang berpatroli di sana.

Untuk aksi penyelundupan yang berhasil, MN mendapatkan imbalan uang sebesar Rp16.000.000 dan RM750 per orang. Imbalan tersebut ia dapat dari J dan A yang keberadaannya belum diketahui. Selanjutnya, MN menjanjikan imbalan sebesar Rp1.600.000 per orang kepada IN dan RO jika "misi" telah diselesaikan.

"Hingga saat ini, kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan penyelundupan PMI nonprosedural ini dan mengupayakan penangkapan pelaku lain yang terlibat," jelas Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Uban Adi Hari Pianto.

Saat ini, kelima WNI tersebut diamankan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka diancam dengan Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyelundupan manusia dengan ancaman pidana denda maksimal sebesar Rp1,5 miliar dan pidana penjara maksimal 15 tahun.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, terutama terkait penyelundupan manusia," tutup Adi. ■

IMIGRASI GELAR OPERASI WIRA WASPADA PERDANA PADA 2025

Ditjen Imigrasi melaksanakan Operasi Wira Waspada untuk menjaring WNA dengan izin tinggal bermasalah di Bali dan Maluku Utara. Ke depannya, operasi ini juga akan dijalankan di seluruh Indonesia, khususnya wilayah dengan aktivitas WNA yang tinggi.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyelenggarakan operasi gabungan Wira Waspada di Bali dan Maluku Utara untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA) di sektor pariwisata dan pertambangan. Operasi Wira Waspada tahap pertama telah dilaksanakan pada 14 s.d. 17 Januari 2025. Sementara itu, tahap kedua dilaksanakan pada 17 s.d. 21 Februari 2025 dengan metode pengawasan langsung ke lapangan yang melibatkan seluruh jajaran kantor imigrasi di Bali dan Maluku Utara, serta pemangku kepentingan terkait.

Di Bali, Imigrasi bersama dengan Kepolisian dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjaring WNA dengan penjamin perusahaan yang telah mengalami

pencabutan nomor induk berusaha (NIB) oleh Kementerian Investasi dan BKPM pada 1 November 2024.

Pada tahap pertama Operasi Wira Waspada, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya. Sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA. Ditjen Imigrasi telah melakukan deportasi dan penangkalan terhadap 15 WNA, sedangkan 111 orang lainnya akan menerima sanksi yang serupa.

Pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 208 WNA dengan sponsor dari 43 perusahaan yang diduga fiktif. Saat ini, 48 orang telah dideportasi.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan, WNA yang melanggar telah dideportasi. Mereka mayoritas berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India, dan Australia. Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"NIB dari 267 perusahaan dicabut karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar 10 miliar ke atas. Potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," jelas Godam.

Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Maluku Utara juga tengah berlangsung. Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa 4.656 orang warga negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan aktivitas WNA yang tinggi," imbuh Godam.

Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata *wira* dan *waspada* dalam bahasa Sanskerta yang bermakna 'berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan selalu siap bela negara, tetapi juga tetap siaga, berhati-hati, dan waspada serta mengutamakan keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas'.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto menegaskan, "Imigrasi berkomitmen untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban." pungkas Menteri Agus. ■

Pengarahan sebelum pelaksanaan Operasi Wira Waspada di Bali (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)



Layanan Percepatan Penerbitan Paspor Sabtu—Minggu

HANYA MELAYANI PERMOHONAN PASPOR BARU & PENGGANTIAN PASPOR

Hadir di lokasi berikut:

Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3)
Lippo Mall Puri Lantai Basement
Waktu pelayanan: 08.30—11.00 WIB

Unit Layanan Paspor (ULP)
Pasar Pagi Mangga Dua
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Lippo Mall Kemang
Area Parkir 5B Lantai 2
Waktu pelayanan: 10.30—11.00 WIB

UP3 Terminal 3 Internasional
Bandara Soekarno-Hatta
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Plaza Semanggi
Waktu pelayanan: 09.30—12.00 WIB

UP3 Mall Cibubur Junction
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB



Siapkan Dokumen Persyaratan

- Bagi pemohon dewasa:
 - KTP-el, kartu keluarga (KK), akta kelahiran/ijazah/buku nikah/surat baptis
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)
- Bagi pemohon anak di bawah umur:
 - KTP-el orang tua, KK, akta kelahiran/surat baptis
 - Bukti menikah orang tua yang sah
 - Paspor orang tua (pendamping)
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram: @kanimjaksel, @kanimjakpus_, @imigrasi.soekarnohatta, @imigrasi_jakut, @imigrasi_jakbar, @imigrasijaktim.



Konferensi pers yang dilaksanakan setelah penangkapan terhadap belasan WNA yang melanggar peraturan keimigrasian (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Operasi Wira Waspada di Batam: **IMIGRASI PERIKSA 12 PERUSAHAAN PMA BERMASALAH**

Dalam Operasi Wira Waspada, Imigrasi berhasil mengamankan dan memeriksa ratusan orang asing dengan penjamin perusahaan penanam modal asing. Kegiatan ini dilakukan untuk menegakkan peraturan keimigrasian dan memastikan hanya warga negara asing berkualitas yang berkegiatan di Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memeriksa 12 perusahaan penanam modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau yang masuk dalam daftar pencabutan nomor induk berusaha (NIB) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Melalui Operasi Wira Waspada jilid II pada 11 s.d. 12 Maret, Imigrasi menekan potensi pelanggaran

keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) dengan penjamin perusahaan PMA yang diduga tak memenuhi persyaratan. Sebelumnya, operasi ini telah dilaksanakan di Bali dan Maluku Utara pada Januari–Februari 2025 dan berhasil menjerang 312 WNA.

Dalam operasi ini, Imigrasi juga menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif

dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, 12 badan usaha PMA diusulkan untuk dicabut NIB-nya. Beberapa perusahaan ini menyampaikan keberatannya dan meminta peninjauan kembali atas keputusan tersebut.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyampaikan bahwa operasi

ini dilaksanakan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup pada area yang telah ditentukan.

“Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam pada Kamis (13/3).

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 26 orang asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, 4 perusahaan belum memenuhi komitmen investasi sebesar Rp10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta 2 perusahaan memiliki alamat yang berbeda dari yang terdaftar. Dari 26 orang asing yang diperiksa, 13 orang asing yang masih berada di Indonesia akan dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian. Sementara itu, sebanyak sembilan orang asing yang berada di luar Indonesia akan dikenakan pembatalan izin tinggal.

Dalam operasi target wilayah industri, delapan WNA diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian. Satu warga negara (WN) Austria berinisial DB, pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan direktur PT All About City, diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggalnya tanpa aktivitas investasi yang jelas. Tiga WN Tiongkok berinisial JM, CC, dan

CK ditangkap saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal. JM dan CC diduga menyalahgunakan ITAS investor yang dimilikinya dengan bekerja sebagai buruh kasar. Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, empat WN Tiongkok berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan.

Selain operasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga sedang menindaklanjuti kasus tindak pidana keimigrasian tiga WN Bangladesh dengan inisial FR, SK, dan SM. Mereka masuk ke Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Mereka diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 113 Undang-Undang No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, satu WN India berinisial MT diduga memalsukan ITAS miliknya. Ia diamankan ketika petugas melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan Sagulung Batam. WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian Pasal 121 huruf b UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Secara keseluruhan, dalam operasi penanaman modal asing (OPS PMA) yang dilakukan bersama BKPM, operasi Bali tahap I menjangkit 126 orang asing dari 74 perusahaan, Bali tahap II mengamankan 186 orang asing dari 86



Pemeriksaan WNA yang diduga melanggar peraturan keimigrasian di Batam, Kepulauan Riau (Foto: Arif Rahman Suryaman)

perusahaan, serta Batam menangkap 26 orang asing dari 12 perusahaan. Dari operasi di Bali tahap I, 49 orang telah diperiksa dan 38 orang di antaranya dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Pada tahap II, dari pemeriksaan terhadap 14 orang, 2 orang telah dikenakan sanksi TAK. Sementara itu, di Batam, 26 orang asing dari 12 perusahaan telah teridentifikasi. Bagi 13 orang yang masih berada di Indonesia, mereka akan dimasukkan ke DPO Keimigrasian, sementara sisanya yang berada di luar Indonesia akan dikenakan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Empat orang pemegang ITAS investor akan dikenakan sanksi TAK.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban umum.

“Kami melaksanakan Operasi Wira Waspada untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan. Kami juga ingin memastikan WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang ditetapkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

“Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi ini memastikan hanya WNA berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan,” tutup Godam. ■

Ruang detensi yang menampung para deteni Kantor Imigrasi Batam (Foto: Arif Rahman Suryaman)



IMIGRASI BERHASIL CIDUK 2 ORANG DPO PEMERINTAH TIONGKOK

Berdasarkan permintaan khusus Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan dua WN Tiongkok yang bermasalah. Keduanya, FN dan GC, masuk dalam DPO karena terlibat dalam kasus kejahatan ekonomi di negara asalnya.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Dua pria warga negara (WN) Tiongkok, FN dan GC, diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/3) dan Minggu (16/3) lalu. Mereka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi. Penangkapan

ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik. Pada Selasa (4/3), Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor terhadap FN dan GC.

Pada Sabtu (15/3), berbekal analisis teknologi pengenalan wajah (*face recognition*), tim Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi ini diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA) tersebut. Namun, tim hanya mendapati FN sesampainya di lokasi.

"Ketika tim kami sampai, hanya ada FN. Dia menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Belakangan kami mendapatkan informasi bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun. Kami kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim) Yuldi Yusman.

Tim kemudian mendatangi kantor di daerah PIK, tetapi GC tidak ditemukan. Sekretaris GC, NT, menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS. FN mengaku memang tinggal bersama GC di Kebayoran Baru, tetapi tidak tahu banyak tentang keberadaan GC saat ini.

Keesokan harinya pada Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai keberadaan GC di Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara RRT atas nama YW. Ia telah tinggal di sana selama kurang lebih 5 tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura. Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW,



**KEBERHASILAN
PENGAMANAN DUA WNA
TERSEBUT TIDAK LEPAS
DARI KOORDINASI DAN
KERJA SAMA YANG BAIK
ANTARA DITJEN IMIGRASI
DAN PERWAKILAN RRT DI
JAKARTA.**

tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Pada pukul 14.15 WIB, pengemudi YW tiba untuk menjemput GC atas perintah YW. Petugas kemudian meminta bantuan ART untuk memberi tahu GC bahwa pengemudi sudah datang. Ketika GC keluar kamar, petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi.

GC dan FN diketahui menggunakan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing (ITAS TKA). Kini, keduanya berada di Ditjen Imigrasi untuk diperiksa dan dipulangkan ke Tiongkok pada Kamis, (27/3).

"Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait perusahaan yang menjadi sponsor kedua DPO tersebut. Apabila bersalah, akan kami tindak," ujar Yuldi.

Terkait penanganan kedua DPO tersebut, Pjt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menyebutkan, FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindakan administratif keimigrasian, berupa deportasi dan cekal, dapat dikenakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena menghindari dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

"Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (*joint investigation*), sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara Ditjen Imigrasi dan perwakilan RRT di Jakarta. Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas," pungkas Godam. ■

KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI DEPORTASI PRIA RUSUH DARI AS

Seorang pria asal Amerika Serikat mengamuk di sebuah klinik di Bali dan menimbulkan kerusakan. Kantor Imigrasi Ngurah Rai bekerja sama dengan Polresta Denpasar untuk menindak perbuatan yang melanggar hukum ini.

■ Penulis: Harjisito Dani



MM, WN Amerika Serikat yang berbuat rusuh di Bali (Sumber: antarafoto.com)

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi dan memasukkan seorang pria asal Amerika Serikat (AS) berinisial MM (27) ke dalam daftar tangkal. Ia melakukan tindakan merusak di Klinik Pratama Nusa Medika, Badung pada Sabtu (12/4) dini hari. Insiden ini memicu respons dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali.

Polresta Denpasar langsung berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. MM diketahui masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 2 April 2025 menggunakan *visa on arrival* yang berlaku hingga 1 Mei 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan menjelaskan bahwa MM melanggar Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.

"Berdasarkan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan akan dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan," ujar Parlindungan.

Insiden bermula ketika MM dan seorang rekannya tiba di klinik dengan taksi daring. Dalam kondisi tidak sadar, MM langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Setelah sadar, MM justru mengamuk, memukul temannya, merusak fasilitas klinik, dan membahayakan pasien lain. Pihak keamanan klinik dibantu linmas (Perlindungan Masyarakat) dan kepolisian berhasil menenangkan pelaku.

Setelah diperiksa di Polsek Kuta Selatan, MM mengaku panik dan terkejut melihat banyak orang asing setelah tersadar. Namun, setelah ditenangkan oleh temannya dan sadar sepenuhnya, ia meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian. Permasalahan ini telah diselesaikan secara damai antara pelaku dan pihak klinik. ■

MASUK INDONESIA SECARA ILEGAL, 3 WN FILIPINA MENJADI TERSANGKA

Kantor Imigrasi (Kanim) Bitung menetapkan warga negara (WN) Filipina berinisial DO, AO, dan CT sebagai tersangka karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan resmi dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Mereka ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Bitung sembari menunggu pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani menjelaskan kronologi penangkapan dan penetapan tersangka ini. "Awalnya mereka datang ke Kanim Bitung sekitar Rabu (12/3) lalu, kemudian bertemu petugas kami di Seksi Intelijen dan Penindakan. Mereka datang untuk melaporkan kerabat

mereka yang tidak punya dokumen resmi," kata Ramdhani pada Kamis, (6/3). Berdasarkan keterangan dari salah satu tersangka, lanjut Ramdhani, petugas kemudian mencurigai bahwa ketiganya juga merupakan WN Filipina yang masuk ke Kota Bitung tanpa dokumen perjalanan yang sah.

Saat diwawancarai, tersangka berinisial CT menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mengantar dua orang laki-laki yang ingin melapor sebagai pemukim tanpa dokumen (*undocumented person*). Petugas kemudian melakukan wawancara lebih lanjut dengan DO dan AO. Dalam wawancara tersebut, salah satu tersangka menunjukkan kartu asuransi kesehatan yang diklaim sebagai identitas.

Kecurigaan petugas makin kuat dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. AO mengakui bahwa ia bersama ayahnya, DO, tiba di Indonesia dari Filipina pada 12 Desember 2024 tanpa menggunakan paspor dan tidak melalui TPI.

Setelah melalui tahap penyidikan, mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ramdhani menjelaskan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah. Mereka juga dijerat dengan Pasal 113 undang-undang yang sama karena sengaja masuk ke Indonesia tanpa melalui TPI. ■



WN Filipina lolos dari hukuman di Indonesia (ilustrasi).
(Sumber: apnews.com)



Pekerja migran Indonesia (ilustrasi)
(Sumber: theconversation.com)

CEGAH KEBERANGKATAN PMI NONPROSEDURAL, KANIM SOETTA TUNDA PENERBITAN 40 PASPOR

Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) menunda penerbitan 40 paspor sepanjang Januari sampai dengan Februari 2025. Kepala Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Johannes Fanny Satria mengatakan bahwa penundaan penerbitan paspor tersebut karena adanya dugaan pergi bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.

“Sudah ada kurang lebih 40 orang yang kami tunda penerbitan paspornya karena diduga akan bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. Nantinya, persetujuan penerbitan paspor [mereka] tetap akan kami proses setelah dilengkapi dengan data dukung dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Fanny saat ditemui di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada

Kamis (6/3).

Penundaan penerbitan paspor itu pun dilakukan untuk mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Diharapkan hal ini juga dapat memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat.

“Kami ingin menggarisbawahi bahwa bekerja atau beraktivitas di luar negeri tidak dilarang. Namun, sangat penting bagi kita semua untuk mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan demi melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari risiko menjadi korban kekerasan atau pemerasan,” tambah Fanny. ■

BERMULA DARI LAPORAN WARGA, 21 WNA TERANCAM DIDEPORTASI

Sebanyak 21 warga negara asing (WNA) yang ditemukan di Garut terancam dideportasi resmi karena tidak memiliki identitas. Selain itu, nama mereka juga akan dimasukkan ke daftar cegah dan tangkal (cekal) oleh pihak Kantor Imigrasi Tasikmalaya.

“Saat ini mereka ditempatkan di ruang detensi. Selanjutnya, mereka akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi (rudenim) hingga pelaksanaan deportasi,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya Indra Bangsawan pada Jumat (21/3).

Kasus ini bermula dari informasi yang diterima oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tasikmalaya dari Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, akan adanya sekelompok WNA tanpa identitas.

Keberadaan 21 WNA ini terungkap setelah adanya laporan dari warga pada Kamis (13/3). Warga melaporkan adanya sekelompok laki-laki yang diantar menggunakan mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan di Pantai Karang Paranje, Garut, Jawa Barat.

Ketika pihak penginapan meminta identitas, mereka tidak dapat menunjukkannya. Oleh karena itu, pihak penginapan berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibalong. Pada Jumat (14/3), tim Inteldakim mendatangi Polsek Cibalong untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan, para WNA tersebut mengaku berasal dari Bangladesh. Salah satu dari mereka sempat menunjukkan paspor Bangladesh kepada petugas.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang diperbolehkan untuk tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat dirugikan oleh WNA yang tidak mematuhi aturan atau berpotensi mengganggu ketertiban dan kedaulatan. ■

Sumber: Humas Kantor Imigrasi

Pelatihan Menghadapi Kejahatan Transnasional:

SINERGI INDONESIA-AUSTRALIA MEMPERKUAT KEAMANAN WILAYAH BALI

Di balik pesona Bali sebagai destinasi wisata dunia, ancaman kejahatan transnasional seperti geng motor mengintai. Melalui pelatihan intensif bersama Australia, petugas imigrasi Indonesia mengasah kemampuan untuk mengamankan pintu gerbang negara.

■ Penulis: Muhammad Teuku Khalif Rafi

Upaya peningkatan kapasitas petugas imigrasi dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional (*transnational serious and organised crime/TSOC*) terus digencarkan. Salah satunya melalui kerja sama bilateral antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Republik Indonesia dan Department of Home Affairs (DHA) Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Rangkaian kegiatan TSOC Threats Workshop kembali digelar di Bali pada 4 Februari 2025 dengan bertempat di Pullman Bali Legian Beach.

Kegiatan yang diikuti oleh 40 personel imigrasi yang bertugas di berbagai tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di wilayah Bali ini merupakan kelanjutan dari suksesnya tiga pelatihan serupa yang telah dilaksanakan sepanjang 2024. Inisiatif ini merupakan komitmen berkelanjutan kedua negara dalam memperkuat keamanan perbatasan, khususnya di Bali yang menjadi pintu gerbang utama pariwisata internasional.

"Saya [berikan] apresiasi tinggi kepada Ditjen Imigrasi atas sinergi yang terjalin dalam penyelenggaraan pelatihan TSOC yang memegang peran krusial dalam menjaga keamanan perbatasan," jelas First Secretary DHA Naurelle Saunders dalam pidato pembukanya.

Materi pelatihan kali ini menyoroti sejumlah tren terkini yang berpotensi mengancam keamanan Bali. Salah satu yang menjadi fokus adalah keberadaan dan aktivitas *outlaw motorcycle gangs* (OMCG) atau geng motor terlarang, seperti Hells Angels, Bandidos, Mongols Australia, dan Comanchero Australia. Ekspansi kelompok-

kelompok ini ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, patut diantisipasi dan menjadi perhatian mengingat potensi gangguan ketertiban dan keamanan yang mungkin terjadi.

Selain ekspansi geng motor internasional ke Asia Tenggara, dibahas pula *airport security and trusted insiders* (TI) atau sistem keamanan di bandara yang melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki akses ke area yang biasanya terlarang, seperti area operasi dan terminal. Materi ini dibawakan oleh Naurelle Saunders yang menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan akses oleh pihak internal bandara.

Saunders juga menjelaskan risiko yang mungkin timbul (mulai dari penyelundupan hingga potensi keterlibatan dalam tindakan terorisme atau sabotase) dan

penekanan perlunya langkah-langkah pengamanan yang ketat, termasuk pemeriksaan latar belakang, pemantauan karyawan, dan pelatihan keamanan yang komprehensif.

Sesi interaktif *Introduction Case Study* menjadi puncak kegiatan, yaitu ketika peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis kasus penemuan paspor Belgia palsu di Bandara Sydney. Diskusi kelompok ini mendorong peserta untuk mengaitkan permasalahan tersebut dengan tantangan yang kerap dihadapi dalam tugas sehari-hari di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Antusiasme peserta terlihat jelas dalam sesi presentasi. Pada sesi ini, berbagai pandangan dan pengalaman terkait penanganan penumpang dan dokumen perjalanan dibagikan.

"Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk menangani permasalahan keimigrasian terkini di wilayah Bali yang sangat kompleks. Selain itu, acara ini membantu kami membangun kepercayaan diri melalui *public speaking*," tutur salah satu peserta, Jimmy Adi Putra Manurung, dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. ■

Pengajar dan peserta TSOC Threats Workshop di Bali (Foto: Dok. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian)





Pelepasan Saffar M. Godam oleh seluruh pegawai Ditjen Imigrasi (Foto: Habil Ashari)

Saffar M. Godam Pamit, **YULDI YUSMAN GANTIKAN SEBAGAI PLT. DIRJEN IMIGRASI**

Dari rekor PNBP Rp9 triliun hingga pengakuan internasional, era Saffar M. Godam berakhir. Yuldi Yusman siap membawa Imigrasi menuju capaian baru.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam yang akan melanjutkan tugas sebagai Asesor SDM Ahli Utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Rabu (23/4) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai penggantinya, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Yuldi Yusman ditunjuk untuk mengemban amanah sebagai Plt. Dirjen Imigrasi.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama

ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," tutur Godam.

Godam menjabat sebagai Plt. Dirjen Imigrasi selama enam bulan sejak ditunjuk oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) Agus Andrianto pada Selasa (22/10/2024) lalu. Masa kepemimpinan Saffar M. Godam ditandai dengan berbagai pencapaian yang signifikan, salah satunya kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBPN sebesar Rp6 triliun (150%).

Selain berkontribusi dalam peningkatan PNBPN, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge di lokasi strategis untuk memudahkan penerbitan paspor dan pemberian izin tinggal bagi masyarakat. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan tiga Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Ciputra World Surabaya, dan Pesona Square (Depok).

Perluasan penggunaan *autogate* di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) juga menjadi fokus utama dengan meneruskan capaian sebelumnya. Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi pun diraih dengan terpilihnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai peringkat ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia tahun 2025 versi Skytrax. Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkang di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Kepemimpinan Bapak Godam telah membawakan perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas. Semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Menteri Imipias Agus Andrianto.

Sementara itu, Plt. Dirjen Imigrasi yang baru, Yuldi Yusman, memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai direktur pengawasan dan penindakan keimigrasian. Prestasi tersebut di antaranya deportasi buronan U.S. Marshals berinisial TJC atas kasus eksploitasi seksual anak, pengamanan 17 warga negara (WN) Vietnam yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di klinik bedah kecantikan, pelaksanaan Operasi Wira Waspada penanaman modal asing (PMA) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Bali dan Batam yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA), serta pengamanan dua WN Tiongkok buronan kasus kejahatan ekonomi.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman menjadi Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," tutup Agus. ■

Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu Resmi Beroperasi: **DIHARAPKAN PACU EKONOMI NASIONAL**

Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu di Batam diresmikan. Pemerintah menargetkan peningkatan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan investasi.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu di kawasan Golden City Bengkulu, Kota Batam, Kepulauan Riau secara resmi dioperasikan pada Senin (14/4). Acara peresmian dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus H. Yudhoyono, Wakil Ketua KPK Johannes Tanik, dan pejabat-pejabat instansi vertikal lainnya.

Golden City Bengkulu merupakan kawasan yang dinamis di Batam. Kawasan ini menawarkan kombinasi antara hunian, bisnis, kuliner, dan aksesibilitas yang baik, menjadikannya tempat yang menarik untuk ditinggali, berbisnis, maupun dikunjungi wisatawan. Peresmian pelabuhan baru di kawasan Golden City Bengkulu diharapkan dapat menjadi stimulus signifikan bagi perekonomian

Indonesia melalui kelancaran arus perlintasan internasional.

Gold Coast Bengkulu menjadi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) kesembilan yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, melengkapi delapan TPI yang telah ada sebelumnya, seperti TPI Udara Bandara Internasional Hang Nadim dan berbagai TPI laut lainnya di Batam. Saat ini, tersedia 8 konter kedatangan dan 8 konter keberangkatan dengan total 15 orang petugas di pelabuhan ini yang melayani rute internasional Batam–Stulang Laut (Johor Bahru, Malaysia) dengan frekuensi dua kali perjalanan per hari. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka rute pelayaran Gold Coast–Singapura.

Penambahan TPI ini sekaligus mengakomodasi peningkatan perlintasan manusia dari dan ke Indonesia melalui Batam. Pada Maret 2025, misalnya, tercatat sejumlah 252 warga negara asing (WNA) melintas



Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu (Foto: Dok. Kanim Batam)

melalui pelabuhan ini atau meningkat sebesar 92% dibanding Februari (131 orang) saat Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu pertama kali beroperasi.

Dalam acara peresmian, Plt. Dirjen Imigrasi bersama para pejabat terkait melakukan peninjauan langsung ke fasilitas TPI Gold Coast. Peninjauan meliputi kesiapan konter pemeriksaan, ketersediaan sumber daya pegawai, dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kelancaran proses keimigrasian.

Saffar M. Godam menyampaikan optimismenya terhadap peran pelabuhan baru ini. "Dengan bertambahnya pintu gerbang negara di Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu, diharapkan arus lalu lintas manusia dari dan ke Indonesia akan makin lancar dan berdampak pada peningkatan ekonomi," ujarnya.

Peresmian Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu ini pun menjadi angin segar bagi upaya peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan beroperasinya pelabuhan ini, diharapkan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan investasi akan makin meningkat sehingga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. ■



Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus H. Yudhoyono turut meninjau kesiapan TPI di Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkulu. (Foto: Dok. Kanim Batam)

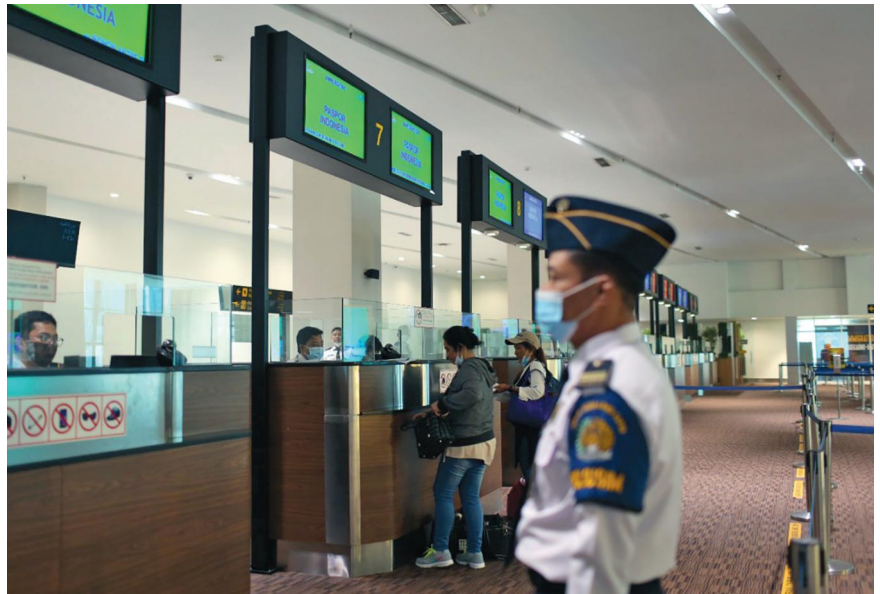
Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta meraih peringkat ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia tahun 2025 versi Skytrax, lembaga independen pemeringkat penerbangan yang berkedudukan di London, Inggris. Dalam situs resminya, Skytrax menjelaskan bahwa hasil penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kedatangan dan keberangkatan; layanan imigrasi dan kontrol perbatasan yang termasuk waktu tunggu, sistem antrian, jalur prioritas, sistem, dan efisiensi *e-gate* (pintu otomatis); serta efisiensi dan kesopanan staf imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto mengatakan, pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pencapaian ini merupakan bentuk pengakuan terhadap transformasi dan inovasi layanan keimigrasian Indonesia, khususnya di bandara internasional.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada Imigrasi Soekarno-Hatta (Soetta) atas prestasi membanggakan mereka yang berhasil masuk 10 besar Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia. Hasil ini adalah wujud kerja keras dan dedikasi petugas TPI (tempat pemeriksaan imigrasi) Soetta yang telah mengatasi berbagai tantangan, termasuk mengorbankan waktu libur. Alhamdulillah, ini adalah kebanggaan bagi Indonesia,” ujar Agus, Jumat (11/4).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan, instansinya telah mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di bandara-bandara dan pelabuhan internasional. Hal ini salah satunya melalui pemanfaatan *autogate* yang memungkinkan pengalaman mulus (*seamless*) bagi penumpang dengan proses pemeriksaan yang efisien, yaitu hanya 10-15 detik per perlintasan. Sistem *autogate* ini juga terintegrasi dengan *border control management* (BCM) dan data Interpol.

“Layanan *autogate* di Indonesia makin inklusif. WNA (warga negara asing) dan bahkan anak-anak mulai usia enam tahun sudah bisa pakai. Hal ini dimungkinkan oleh visa elektronik (*e-visa*) Indonesia dan teknologi *face recognition* (pengenalan wajah) yang makin canggih,” tutur Godam.



Situasi tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

LAYANAN IMIGRASI BANDARA SOEKARNO-HATTA MASUK 10 BESAR TERBAIK DUNIA

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mencatatkan tonggak sejarah baru dengan masuk dalam 10 besar Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia versi Skytrax. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan apresiasi setinggi-tingginya.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Hingga saat ini, *autogate* telah dioperasikan di beberapa titik perlintasan utama Indonesia, meliputi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Kualanamu, Bandara Internasional Juanda, dan Pelabuhan Batam Center, dengan total 264 unit. Jumlah tersebut akan terus bertambah guna mengoptimalkan proses pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Agus juga memaparkan, selain memanfaatkan teknologi terkini, jajaran Imigrasi di bandara dan pelabuhan juga mengupayakan rekayasa alur penumpang pada waktu-waktu krusial, seperti liburan sekolah, Idulfitri, Natal, dan tahun baru. Dengan demikian, lalu lintas penumpang tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan.

Tercatat sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta melayani total 17.166.177 perlintasan yang terdiri atas 8.615.937 keberangkatan dan 8.550.240 kedatangan. Sementara itu, dalam periode 1 Januari-10 April 2025, jumlah perlintasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah 4.987.378 perlintasan, terdiri atas 2.473.802 keberangkatan dan 2.513.576 kedatangan.

“Kami berharap pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ke depan, kami akan terus berinovasi, memperkuat integrasi sistem, serta menjaga profesionalisme petugas demi memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat dan wisatawan internasional,” tutup Agus. ■

Tangkis Perdagangan Orang: **IMIGRASI MEULABOH BENTUK DESA BINAAN**

Tiga desa di Aceh jadi Desa Binaan Imigrasi dan siap hadapi ancaman perdagangan manusia. Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, warga diajak bersama-sama antisipasi kejahatan transnasional.

■ Penulis: Mufizal

Dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat warga Aceh hingga ke Laos dan Malaysia, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Meulaboh bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Aceh membentuk program Desa Binaan Imigrasi (DBI) di Kabupaten Aceh Singkil. Program yang diresmikan pada 14 April 2025 ini menunjuk petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) sebagai garda

terdepan dalam upaya pencegahan TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagai lokasi prioritas didasarkan pada kasus sebelumnya yang sempat menimpa warga dari Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Gunung Meriah. Melalui program DBI, Imigrasi Meulaboh akan melakukan pembinaan intensif guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kejahatan transnasional ini.

Tiga desa resmi ditetapkan sebagai DBI, di antaranya Desa Lae Butar (Kecamatan Gunung Meriah), Desa Tanah Merah (Kecamatan Gunung Meriah), dan Desa Lae Balno (Kecamatan Danau Paris). Untuk setiap desa, ditunjuk satu petugas dari aparat desa.

Sebelumnya, DBI pertama kali dicanangkan di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Untuk mencegah TPPO secara sistematis dan luas, DBI kemudian dijadikan salah satu program skala nasional Ditjen Imigrasi bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia.

Program DBI ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang tangguh terhadap ancaman TPPO dan penyelundupan manusia. Selain

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh bersama dengan Kepala Desa Binaan Tanah Merah (Foto: Dok. Kanim Meulaboh)





Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman menjabat tangan pimpasa Desa Lae Butar. (Foto: Dok. Kanim Meulaboh)

itu, program ini juga berguna untuk memperkuat sinergi antara Imigrasi dan masyarakat demi melindungi warga negara Indonesia (WNI) di wilayah perbatasan dan terpencil.

Pimpasa yang merupakan perwakilan Imigrasi berperan sebagai agen informasi, pengawas, dan penyuluh di tingkat desa. Pimpasa juga melakukan koordinasi rutin dengan Kantor Imigrasi Meulaboh serta instansi terkait.

“Konsep dasar pimpasa adalah mendekatkan fungsi keimigrasian hingga ke tingkat desa melalui pendekatan personal, partisipatif, dan edukatif. Petugas yang terlibat dibekali kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman hukum yang memadai. Mereka hadir bukan hanya sebagai representasi negara, melainkan juga bagian dari komunitas yang siap mendampingi, mendengarkan, dan membimbing masyarakat,” papar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Meulaboh Jamaluddin.

Jamaluddin menjelaskan bahwa pimpasa akan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk rapat desa, pengajian, dan forum pemuda. Dalam setiap interaksi, mereka akan menyampaikan informasi mengenai modus operandi TPPO dan TPPM, memberikan edukasi tentang prosedur perjalanan luar negeri yang aman dan legal, serta mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

Pemetaan sosial untuk mengidentifikasi potensi kerawanan di tiap-tiap desa binaan juga menjadi

salah satu peran yang dijalankan pimpasa. Faktor-faktor seperti pengangguran, akses informasi yang terbatas, dan kontrol sosial yang lemah akan dicatat sebagai dasar penyusunan langkah-langkah pencegahan yang strategis.

Peran penting pimpasa juga tercermin dalam upaya membangun jaringan kemitraan lokal yang kuat, bekerja sama dengan perangkat desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh agama, serta tokoh adat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem deteksi dini terhadap indikasi tindak kejahatan lintas negara, sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat dan institusi imigrasi serta membangun transparansi dan kepercayaan publik.

Kantor Imigrasi Meulaboh sebagai pelaksana utama program DBI dan pimpasa memiliki peran krusial dalam membimbing dan mengedukasi masyarakat secara langsung. Lebih dari sekadar menjadi pengawas administrasi keimigrasian, Imigrasi Meulaboh berperan sebagai mitra aktif dalam meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya TPPO dan TPPM melalui berbagai forum seperti pertemuan desa, pelatihan, dan penyuluhan.

Keterlibatan langsung dalam pemetaan wilayah rawan TPPO dan TPPM juga membantu menciptakan sistem deteksi dini berbasis komunitas. Kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat,

dan instansi terkait memastikan keberlanjutan dan adaptasi program sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui implementasi akselerasi program secara nasional, Imigrasi Meulaboh menjadi garda terdepan dalam perlindungan seluruh WNI dan misi kemanusiaan.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh Novianto Sulastono menyatakan, upaya pemberantasan TPPO akan terus diprioritaskan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah perluasan program ke desa-desa lain di Aceh yang memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang serupa.

Lebih lanjut, Novianto menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, termasuk melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu mencegah TPPO dan menciptakan lapangan kerja yang aman dan legal di dalam negeri.

“Kami juga menekankan penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan DBI. Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk memberikan dukungan yang lebih besar, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk kelanjutan program dan bantuan dalam penguatan kapasitas masyarakat desa agar mampu menjadi pelopor pencegahan TPPO di daerah masing-masing,” tegas Novianto.

“Dengan langkah-langkah ini, kami yakin program DBI akan makin efektif dalam melindungi masyarakat Aceh dari ancaman TPPO dan TPPM, serta menciptakan desa-desa yang berdaya dan tangguh,” pungkasnya. ■

Penyematan identitas pimpasa oleh Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman (Foto: Dok. Kanim Meulaboh)



Layanan Imigrasi untuk Anak: **HAL YANG HARUS ANDA KETAHUI**

Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan khusus mengenai layanan imigrasi dan paspor bagi anak. Apa saja kebijakan tersebut? Mari simak penjelasannya.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Indonesia memiliki kebijakan layanan imigrasi dan paspor yang berbeda bagi anak dalam rentang usia tertentu. Berikut ini adalah kebijakan tersebut.

1. Masa Berlaku Paspor Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2022 Pasal 2A, masa berlaku paspor Indonesia untuk anak usia 0–16 tahun adalah maksimal 5 tahun. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin menjelaskan, “Kebijakan tersebut disesuaikan dengan batas usia dewasa di Indonesia, [yaitu ketika] WNI sudah harus memiliki KTP (kartu tanda penduduk) pada usia 17 tahun. Pertimbangan lain adalah

perubahan fisik anak yang terjadi seiring pertumbuhan mereka.”

2. Anak Didampingi Orang Tua saat Datang ke Kantor Imigrasi

Orang tua atau wali sah harus mendampingi anak saat wawancara dan pengambilan biometrik paspor yang dilakukan di kantor imigrasi. Orang tua atau wali sah perlu hadir untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan persetujuan resmi dalam pembuatan paspor anak.

“Sebisa mungkin anak didampingi kedua orang tuanya. Namun, apabila orang tua yang satu tidak mungkin hadir, anak boleh didampingi salah satu orang tua saja asalkan membawa surat



Anak dengan usia minimal 6 tahun dapat menggunakan fasilitas *autogate*. (Fot: Habil Ashari)

pernyataan yang sudah ditandatangani,” jelas Tato.

3. Anak Usia Minimal 6 Tahun Dapat Menggunakan *Autogate*

Anak berusia enam tahun ke atas sudah dapat menggunakan *autogate* di bandara internasional sehingga tidak perlu melalui pemeriksaan manual oleh petugas. Melalui fasilitas ini, Imigrasi ingin memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan, termasuk untuk anak-anak.

4. Layanan Prioritas Kantor Imigrasi untuk Anak Balita

Anak berusia 0–5 tahun termasuk dalam kelompok pemohon prioritas di kantor imigrasi. Tanpa mendaftarkan antrean secara daring melalui M-Paspor, orang tua bisa langsung datang (*walk-in*) ke kantor imigrasi terdekat untuk mengurus paspor anak balita. Agar mendapatkan kuota layanan paspor prioritas, orang tua dan anak disarankan sudah tiba di kantor imigrasi saat kantor baru mulai beroperasi.

5. Layanan Prioritas di Pemeriksaan Imigrasi Bandara atau Pelabuhan

Imigrasi menyediakan layanan prioritas pemeriksaan imigrasi bagi anak di bandara dan pelabuhan internasional utama. Layanan prioritas ini dapat mengurai antrean dan memberikan kenyamanan bagi anak karena anak tidak perlu menunggu terlalu lama.

Pit. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan, “Kami terus berupaya memberikan layanan keimigrasian yang ramah keluarga, termasuk dalam hal kemudahan bagi anak-anak saat proses pembuatan paspor dan pemeriksaan di bandara. Dengan memahami regulasi yang berlaku, kami harap masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih nyaman dan lancar.” ■

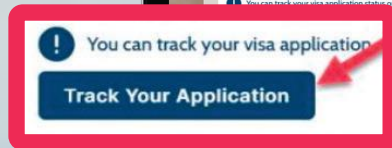
Proses pengambilan foto untuk paspor anak harus dengan pendampingan orang tua. (Foto: Arif Rahman Suryaman)



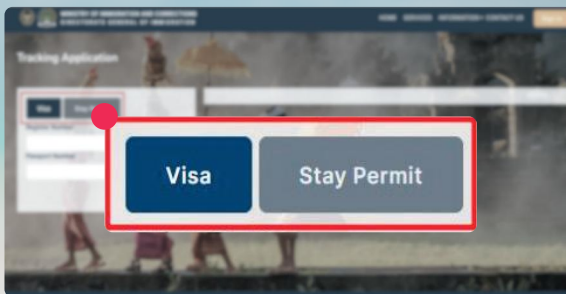
Tracking Your Visa & Stay Permit Status

1. Go visit evisa.imigrasi.go.id to start the process.

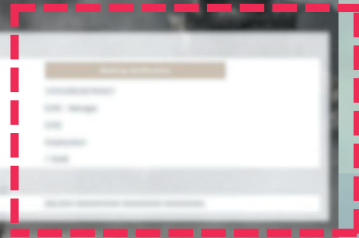
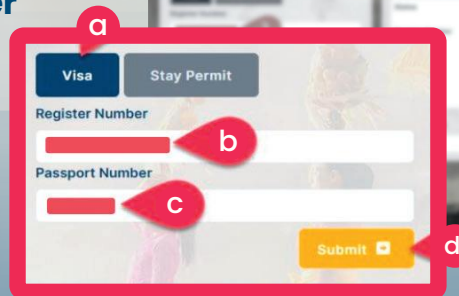
2. Go to the **"Track Your Application"** section.



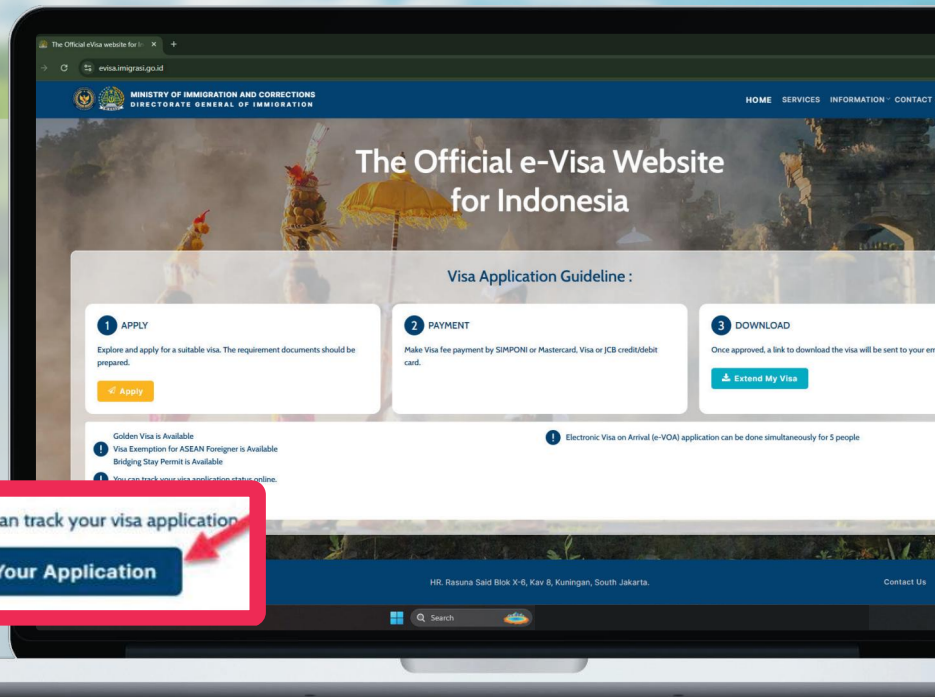
3. Select the service type: **Visa or Stay Permit.**



4. Enter your **Register Number & Passport Number** and click "Submit".



View your **application status** displayed on this area.



Rumah Detensi Imigrasi yang Ideal dan Berbasis HAM: SEBUAH REFLEKSI

Rumah detensi imigrasi seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan penderitaan. Dengan belajar dari negara-negara maju, Indonesia bisa mengubah rumah detensi imigrasi dari “penjara imigran” menjadi pusat rehabilitasi yang menghargai martabat manusia.

■ Penulis: Danny Ariana

Pada era globalisasi ini, mobilitas lintas negara menjadi tak terhindarkan. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur arus masuk pendatang asing demi keamanan nasional, kepentingan ekonomi, dan stabilitas sosial. Namun, pengetatan aturan imigrasi memunculkan tantangan baru dalam mengelola individu yang tidak memenuhi syarat tinggal. Untuk itu, detensi imigrasi menjadi solusi administratif. Dalam konteks ini, rumah detensi imigrasi (rudenim) memainkan peran krusial.

Rudenim adalah fasilitas penahanan sementara bagi imigran yang melanggar aturan keimigrasian atau menunggu deportasi. Namun, pengelolannya sering kali menghadapi kritik karena kondisi fisik yang kurang memadai, tata kelola yang tidak manusiawi, dan ketidaksesuaian dengan standar hak asasi manusia (HAM) internasional. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan fisik dan psikologis, terutama bagi kelompok rentan seperti pencari suaka dan korban perdagangan manusia.

Beberapa negara maju telah berupaya memperbaiki pengelolaan

rudenim dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM, alternatif penahanan, dan program reintegrasi. Negara-negara seperti Kanada, Swedia, Jerman, dan Australia telah melakukan reformasi kebijakan detensi untuk memperbaiki fasilitas dan menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta skema pemantauan berbasis komunitas.

Indonesia, sebagai salah satu titik transit utama migrasi di Asia Tenggara, menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan rudenim, terutama terkait keterbatasan anggaran dan tuntutan

Potret Rumah Detensi Imigrasi Jakarta (Foto: Dok. Rudenim Jakarta)



kepatuhan pada standar internasional. Pembelajaran dari praktik-praktik terbaik di negara maju dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merancang sistem detensi yang lebih manusiawi dan efektif. Idealnya, rudenim di Indonesia tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga wadah rehabilitasi, integrasi, dan perlindungan hak asasi deteni.

Tulisan ini mengupas tentang konsep ideal pengelolaan rudenim secara holistik, menggabungkan standar internasional dan praktik terbaik dari negara maju. Tulisan ini diharapkan dapat menginspirasi kebijakan rudenim yang etis, efektif, dan berfokus pada kemanusiaan dalam konteks tantangan Indonesia.

Landasan Hukum dan Kebijakan yang Jelas

Pengelolaan rudenim yang ideal harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan sejalan dengan standar internasional, seperti *UNHCR Detention Guidelines*. Detensi seharusnya menjadi pilihan terakhir, dengan durasi yang terbatas dan transparan. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Swedia membatasi durasi detensi imigran, sementara Australia menerapkan transparansi melalui laporan tahunan yang dipublikasikan oleh Commonwealth Ombudsman (Lembaga Pengawas Pelayanan Publik).

Fasilitas yang Layak dan Memadai

Dalam pengelolaan rudenim yang ideal, pemenuhan fasilitas dan layanan dasar yang memadai adalah hal yang krusial. Akses pada layanan kesehatan, informasi legal, konseling, dan pendidikan juga harus disediakan.

Negara seperti Kanada dan beberapa negara Eropa telah menerapkan standar tinggi dalam menyediakan fasilitas dan layanan dasar bagi deteni. Penghormatan terhadap hak privasi juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan rudenim. Pengelolaan rudenim yang ideal harus berfokus pada HAM, dengan prinsip nondiskriminatif dan pendekatan antikekerasan.

Perlakuan terhadap imigran tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang etnis, agama, atau asal negara. Petugas detensi perlu dilatih untuk mengelola situasi dengan cara antikekerasan, seperti yang diterapkan di Swedia dan Norwegia yang berhasil mengurangi insiden

konflik dalam pusat detensi. Selain itu, patut dipertimbangkan alternatif dari penahanan, seperti *community-based monitoring* (pengawasan berbasis komunitas), *reporting requirements* (pelaporan wajib), dan *bond systems* (sistem jaminan). Negara-negara maju seperti Australia dan Kanada telah menerapkan program yang memungkinkan imigran untuk tinggal di komunitas dengan pengawasan.

Program relokasi dan penempatan ulang juga dapat menjadi alternatif yang efektif, seperti yang diterapkan di Belanda. Hal yang tidak kalah penting adalah penanganan yang berfokus pada kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Rudenim perlu menyediakan fasilitas khusus dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Layanan kesehatan dan psikologis juga harus tersedia, terutama bagi korban kekerasan atau trauma. Negara-negara seperti Inggris dan Jerman telah memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan di rudenim.

Pengawasan Independen dan Pelaporan Terbuka

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rudenim, pengawasan independen dan pelaporan terbuka adalah kunci. Pengawasan oleh pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau badan pengawas independen, dapat mengurangi risiko pelanggaran HAM. Negara-negara seperti Australia dan Inggris telah menunjukkan komitmen pada transparansi melalui publikasi laporan dan audit reguler.

Sebagai bagian dari pengelolaan imigrasi yang etis, proses deportasi yang humanis dan program reintegrasi yang efektif juga penting. Deportasi harus dilakukan dengan menghormati martabat individu, sedangkan program reintegrasi dapat membantu imigran untuk memulai kehidupan baru di negara asal mereka. Negara-negara seperti Norwegia dan Jerman telah menerapkan praktik-praktik baik dalam proses deportasi dan reintegrasi.

Langkah-Langkah Konkret

Rudenim yang ideal menggabungkan kepatuhan pada standar internasional dengan pendekatan berbasis HAM, fasilitas memadai, dan alternatif yang humanis. Praktik-praktik terbaik dari negara-negara maju dapat



Warga negara Vietnam di Rudenim Pusat Tanjungpinang yang tertangkap ketika melakukan penangkapan ikan ilegal di daerah kedaulatan Indonesia (Foto: Tommy Ariyanto)

menjadi model bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas rudenim dengan memprioritaskan HAM, efisiensi, dan transparansi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret.

Pertama, penting untuk mempertimbangkan penerapan batas waktu penahanan maksimum bagi deteni, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga dari penahanan yang berkepanjangan. *Kedua*, memasukkan peningkatan fasilitas rudenim ke dalam prioritas dapat memastikan terpenuhinya standar sanitasi, keamanan, serta kesehatan fisik dan mental bagi semua deteni.

Ketiga, diadakannya pelatihan intensif bagi petugas rudenim mengenai prinsip-prinsip nondiskriminatif dan antikekerasan, seperti yang telah sukses diterapkan di Swedia dan Norwegia, adalah krusial untuk mengubah budaya pengelolaan detensi. *Keempat*, pengembangan alternatif penahanan, seperti program pelaporan wajib atau sistem pengawasan berbasis komunitas bagi imigran yang memenuhi syarat, dapat secara signifikan mengurangi tekanan pada kapasitas rudenim.

Terakhir, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pengawasan independen oleh LSM atau lembaga internasional perlu dilakukan untuk mengawasi pengelolaan rudenim di Indonesia. ■

Morotai dan Keamanan Nasional: MENGUNGKAP TANTANGAN KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN INDONESIA TIMUR

Penguatan pengelolaan keimigrasian di wilayah perbatasan, seperti Morotai, menjadi penting dalam menghadapi ancaman lintas negara yang makin kompleks. Untuk itu, berbagai strategi dan upaya terpadu diperlukan guna menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.

■ Penulis: Sam Fernando

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) merupakan aspek krusial dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai entitas berdaulat, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan, penduduk, dan wilayahnya dari berbagai ancaman. Upaya ini merupakan bagian integral dari konsep keamanan nasional.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan, terjadi pergeseran paradigma dari yang sebelumnya berorientasi ke dalam menjadi ke luar (*outward looking*). Perubahan ini bertujuan menjadikan wilayah perbatasan beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Pembangunan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memerlukan perencanaan yang terpadu. Perencanaan ini harus menyeimbangkan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Efektivitas pengelolaan perbatasan juga sangat bergantung pada sinergi kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini penting pada setiap tahap pelaksanaan guna menciptakan wilayah perbatasan yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap berbagai ancaman yang tidak lagi terbatas pada ancaman konvensional. Perkembangan politik dan teknologi telah memunculkan ancaman nonkonvensional yang makin kompleks, mulai dari embargo ekonomi, operasi mata-mata, penggunaan

senjata biologis, penyusupan, sabotase, penyadapan komunikasi, hingga terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.

Secara umum, ancaman dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman internal, eksternal, dan internal-eksternal. Ketiga jenis ancaman ini saling terkait dan membentuk jaringan ancaman kompleks yang perlu diwaspadai di wilayah perbatasan.

Tantangan Spesifik di Morotai

Bicara mengenai ancaman, wilayah perbatasan Indonesia, termasuk Morotai, menjadi jalur masuk bagi berbagai kegiatan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan keimigrasian.

Salah satu permasalahan krusial adalah penyelundupan senjata api ringan (*small arms and light weapons*)

Salah seorang penduduk dan kapal kecil di perairan Pulau Morotai (Sumber: blulpmpk.id)



SALW). Morotai menjadi salah satu titik transit penyelundupan senjata ilegal dari Filipina yang masuk melalui Bitung, Sulawesi Utara, menuju Papua. Modus operandi yang sering digunakan adalah memanfaatkan kapal kecil untuk menghindari pemeriksaan di pelabuhan utama. Senjata disembunyikan atau dipecah menjadi bagian-bagian kecil untuk diselundupkan.

Selain penyelundupan barang, mobilitas manusia ilegal juga menjadi tantangan signifikan. Kemudahan dalam kegiatan ilegal ini menjadikan kawasan perbatasan rentan terhadap masuknya pelaku kejahatan.

Penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) oleh nelayan asing, terutama dari Filipina, juga menjadi masalah yang kerap terjadi di perairan sekitar Morotai. Hal ini berdampak pada sumber daya kelautan Indonesia.

Lebih lanjut, terdapat masalah kewarganegaraan dan identitas warga Sanger-Filipina, Filipina-Sanger (SaPi-PiSang) di wilayah perbatasan utara Indonesia, termasuk Morotai. Ketidakjelasan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Filipina-Sanger menambah kompleksitas permasalahan keimigrasian di wilayah tersebut.

Upaya yang Diperlukan

Mengingat kompleksnya permasalahan keimigrasian di Morotai, beberapa upaya strategis perlu dilakukan. Berikut beberapa upaya yang disarankan.

Pos Pengawasan Keimigrasian

Peningkatan pengawasan memerlukan pembangunan pos-pos pengawasan di daerah rawan. Pos ini berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat lokal mengenai dampak kejahatan lintas negara melalui pendekatan edukatif dan preventif.

Pendekatan edukatif dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya terlibat dalam kejahatan transnasional. Sementara itu, pendekatan preventif melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menyuarakan bahaya kejahatan transnasional bagi keamanan dan kedaulatan negara.

Sarana dan Prasarana Pendukung

Efektivitas pengawasan keimigrasian sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu kebutuhan mendesak adalah penyediaan kapal patroli untuk pengawasan. Mengingat luasnya wilayah



Muhlis Eso, pendiri Museum Swadaya Perang Dunia II di Pulau Morotai (Foto: Agoes Rudianto)

perairan Indonesia dan tingginya potensi kejahatan lintas negara, keberadaan kapal patroli akan sangat membantu dalam meningkatkan pengawasan dan menjaga kedaulatan negara.

Koordinasi Antarotoritas Perbatasan

Sinergi dan koordinasi yang kuat antara Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, Polri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sangat diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif di perbatasan.

Pembentukan Badan Keimigrasian Terpadu

Untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan kewenangan, pembentukan badan keimigrasian yang terpadu dengan prinsip *one body one regulation* perlu dipertimbangkan. Pembentukan badan ini bertujuan menyatukan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan perbatasan sehingga kebijakan, pelaksanaan tugas, dan anggaran dapat lebih efisien dan terkoordinasi.

Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat berperan sebagai subjek dan objek pembangunan. Dengan pemberdayaan masyarakat, potensi sumber daya alam (SDA) diharapkan dapat dikelola untuk meningkatkan ekonomi lokal, menambah daya beli, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga kawasan perbatasan sebagai bagian dari kedaulatan negara.

SDM dan *Local Boy for Local Job*

Penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat di wilayah perbatasan sangat penting untuk efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian.

Untuk mengatasi berbagai tantangan terkait penempatan personel, perlu dipertimbangkan konsep *local boy for local job*. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan putra daerah yang telah lulus seleksi menjadi petugas imigrasi untuk mengabdikan dan mengembangkan karier di daerah asalnya.

Penerapan konsep ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik internal yang terkait dengan isu SARA dan benturan sosial budaya, serta memperkuat konsep *community immigration*. Dengan strategi pengembangan SDM yang terencana dan terintegrasi, wilayah perbatasan diharapkan dapat menjadi benteng yang kokoh bagi kedaulatan negara. Imigrasi, sebagai garda terdepan, terus berkomitmen dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, serta memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.

Dengan mengimplementasikan berbagai upaya tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, permasalahan keimigrasian di Morotai diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif sehingga dapat memperkuat kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan. ■

Satu Pengguna, Foto Beraneka: **DI BALIK PEMILIHAN FOTO PROFIL MEDIA SOSIAL**

Orang-orang cenderung menggunakan foto profil yang berbeda di media sosial yang berbeda. Pemilihan foto profil dapat menjadi upaya membangun citra.

■ Penulis: Ardtel Tamara Siahaan, Universitas Airlangga

Kamu pernah kepo dengan foto profil orang di LinkedIn, Instagram, atau Tinder? Kok, bisa, ya, satu orang mempunyai foto profil yang berbeda-beda? Apakah ini berarti mereka memiliki beberapa

kepribadian? Tidak jarang kita menilai orang lain dari foto profil media sosial. Ternyata, ada penelitian yang mendukung kebiasaan ini, lo!

Sebuah studi dari Universitas York menunjukkan bahwa dalam hitungan

detik, kita bisa menebak sifat seseorang hanya dari foto profilnya. Namun, seberapa akuratkah tebakan ini?

Tiga Contoh Media Sosial

Pada zaman modern ini, ada berbagai macam media sosial untuk mengekspresikan diri. Mari kita ambil tiga media sosial dengan karakteristik yang khas sebagai sampel: LinkedIn, Instagram, dan Tinder.

LinkedIn adalah platform jaringan profesional yang berorientasi pada

Sumber: freepik.com



membangun jaringan, mencari pekerjaan, dan mengembangkan karier. Instagram berfungsi untuk mawadahi interaksi pengguna yang dilakukan dengan berbagi foto dan video, mengirim pesan, menyukai dan memberikan komentar pada unggahan, dan lain-lain sehingga cocok digunakan untuk mengekspresikan diri dan estetika.

Sementara itu, Tinder adalah aplikasi kencan daring yang memungkinkan pengguna untuk mencari pasangan, memperluas jaringan sosial, atau bertemu orang baru. Biasanya, para pengguna di Tinder cenderung menonjolkan daya tarik personal dan kepribadian untuk mempermudah mendapatkan teman baru.

Pemilihan Foto Profil secara Psikologis

Orang-orang cenderung menggunakan foto profil yang berbeda di ketiga media

sosial ini. Di LinkedIn, para pengguna menggunakan foto bergaya formal dengan pakaian kerja dan latar belakang yang netral karena ingin terlihat kredibel dan kompeten.

Di Instagram, para pengguna biasanya lebih bebas memilih foto. Foto ini bisa berupa swafoto, candid, atau bahkan ilustrasi dengan warna dan estetika yang lebih beragam tergantung preferensi atau penjenamaan akun.

Sementara itu, di Tinder, orang-orang cenderung menampilkan sisi menarik dirinya untuk dijadikan foto profil.

Ternyata, pemilihan foto profil yang berbeda-beda ini bisa dijelaskan secara psikologis. Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959) mengungkapkan bahwa manusia akan selalu berusaha mengontrol bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Dalam teori *self-presentation* ini, manusia secara sadar memilih bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain, termasuk saat menentukan foto profil di media sosial.

Dalam teori ini, orang-orang cenderung menyesuaikan citra mereka sesuai dengan konteks sosial. Dengan begitu, bisa dipahami bahwa penggunaan foto profil yang berbeda-beda di ketiga contoh media sosial di atas disebabkan oleh tujuan dan kegunaan yang berbeda.

Menilai Kepribadian dari Foto Profil

Apakah kepribadian bisa dinilai dari foto profil? Secara psikologis, foto profil bisa memberikan petunjuk tentang kepribadian seseorang meski tidak selalu 100% akurat. Sebuah penelitian oleh Stopfer et al. (2014) menemukan adanya lima dimensi kepribadian utama (*big five personality traits*) yang sering tecermin dalam foto profil seseorang. Kelima dimensi kepribadian ini adalah sebagai berikut.

1. Ekstrover: foto cerah, banyak senyum, bersama orang lain
2. Neurotisme (mudah cemas): ekspresi lebih serius, foto cenderung berlatar gelap

SECARA PSIKOLOGIS, FOTO PROFIL BISA MEMBERIKAN PETUNJUK TENTANG KEPERIBADIAN SESEORANG MESKI TIDAK SELALU 100% AKURAT.

3. Keterbukaan terhadap pengalaman: foto dengan elemen unik, artistik, atau berbeda dari yang lain
4. Kesadaran (*conscientiousness*): foto rapi, pencahayaan bagus, menunjukkan keteraturan
5. Sifat menyenangkan (*agreeableness*): foto dengan senyum lebar atau elemen yang menunjukkan keramahan

Namun, seberapa akuratkah penilaian ini? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan adanya teori *self-presentation*. Lewat teori ini, bisa saja seseorang yang sebenarnya pemalu memilih foto ceria agar terlihat lebih percaya diri. Artinya, tidak semua orang menampilkan diri sesuai dengan kepribadian aslinya di media sosial.

Teori Manajemen Kesan

Selain teori *self-presentation* dari Goffman, terdapat teori lain yang dapat menjelaskan tindakan manusia dalam memilih foto tertentu untuk membangun kesan tertentu. Teori ini adalah manajemen kesan (*impression management theory*) oleh Edward E. Jones dan Thane Pittman.

Teori manajemen kesan menyatakan bahwa manusia mengelola kesan yang ingin diberikan kepada orang lain, tergantung pada audiens. Contohnya, seseorang yang introver bisa memilih foto ceria untuk terlihat lebih ramah.

Kita memainkan peran yang berbeda di berbagai media sosial. Kita sebagai pengguna bisa memanipulasi penggunaan foto profil agar sesuai dengan kesan yang ingin kita tampilkan. Maka, penggunaan foto profil yang berbeda-beda di beberapa media sosial adalah hal yang sangat normal.

Foto Profil = Kepribadian?

Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Kita harus menyadari bahwa foto profil, di media sosial apa pun, adalah kombinasi dari kepribadian asli yang ingin kita tonjolkan dan strategi sosial untuk tujuan yang ingin kita capai.

Jadi, jika foto profil seseorang berbeda-beda di berbagai media sosial, bukan berarti kepribadiannya banyak. Ia bisa disebut dengan "*multifaceted personality*" atau mempunyai banyak sisi yang bisa ditampilkan sesuai dengan situasi.

Foto profilmu sendiri apakah benar-benar mencerminkan dirimu? Atau, justru itu adalah versi terbaik dirimu yang ingin kamu tunjukkan? ■



ROMANTISISASI PESONA JAKARTA DENGAN TUR BUS BERATAP TERBUKA

Jakarta kini menawarkan pengalaman wisata baru. Melalui Open Top Tour Jakarta, masyarakat dapat menikmati keindahan gemerlap kota saat senja dan malam hari. Dengan harga yang terjangkau dan beragam fasilitas eksklusif, wisata ini patut dicoba bagi yang ingin menikmati Jakarta dengan cara berbeda.

■ Penulis: Roro Aditya Citraningtyas Ningrum

Menikmati keindahan kota Jakarta kini bisa dirasakan melalui Open Top Tour Jakarta. Pemandangan langit Jakarta yang secara eksklusif tersaji pada bus tingkat dengan atap terbuka menjadikan wisata ini pilihan baru bagi yang ingin merasakan pengalaman tur yang unik. Dengan Open Top Tour Jakarta, pengunjung berkesempatan untuk mengitari jalan-jalan protokol Jakarta, seperti Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, sambil menikmati keindahan jajaran gedung pencakar langit dan tengeran (*landmark*) ikonik kota Jakarta.

Layanan dan Fasilitas Menarik

Open Top Tour Jakarta yang diresmikan pada 20 Desember 2024 ini diluncurkan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan berkolaborasi dengan Brightspot. Wisata ini menawarkan konsep baru dengan menjadikan tengeran ikonik dan gedung tinggi yang menjadi ciri khas Jakarta sebagai objek utamanya. Rute Jakarta Skylines menjadi rute perdana yang dirancang untuk beroperasi pada sore dan malam hari. Tur ini memberikan pengalaman wisata yang mengintegrasikan budaya, sejarah, dan modernitas kota Jakarta.

Tur ini berlangsung selama 30–40 menit. Sebelum memulai tur, pemandu akan memberikan penjelasan singkat mengenai ketentuan tur. Selama tur berlangsung, pengunjung mendapat akses eksklusif untuk menikmati perjalanan dari lantai dua bus tingkat beratap terbuka. Pengunjung juga

dapat merasakan *audio tour experience* dengan fasilitas *silent headphone* selama perjalanan. Pemandu wisata akan memberikan panduan mengenai informasi budaya maupun sejarah dari berbagai objek menarik yang dilewati.

Ketika mengikuti tur ini, pengunjung diwajibkan untuk memperhatikan arahan dari pemandu wisata. Pengunjung juga diminta untuk selalu berhati-hati terhadap lingkungan sekitar karena bus tingkat ini memiliki dimensi yang lebih tinggi dari armada Transjakarta yang biasanya. Pengunjung diminta agar selalu menjaga jarak, tidak melebihi tinggi atap bus, dan diimbau untuk menunduk di beberapa titik agar tidak terantuk saat melewati Jembatan Semanggi ataupun ranting pepohonan.

Fasilitas lain yang didapatkan adalah Gang Ratu Lounge, Ratu Plaza, Jakarta Pusat. Pengunjung mendapat akses ke ruang tunggu premium untuk bersantai ditemani sajian kuliner yang khas dari hasil kurasi Brightspot. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli *merchandise* eksklusif hasil kerja sama dengan Brightspot sebagai kenang-kenangan.

Pilihan Senja dan Malam

Open Top Tour Jakarta hadir dengan dua pilihan sesi yang dapat disesuaikan dengan preferensi waktu pengunjung, yaitu *Sunset Tour* dan *Night Tour*. Bagi yang ingin menikmati keindahan senja Jakarta, sesi *Sunset Tour* tersedia pada pukul 16.00 dan 17.30 WIB. Dan sesi *Night Tour* yang dimulai pada pukul 19.00 dan 20.30 WIB memberikan

kesempatan untuk melihat gemerlapnya Jakarta pada malam hari.

Tiket tur ini dapat dipesan dengan mudah melalui aplikasi Transjakarta dengan metode pembayaran AstraPay. Metode ini memungkinkan pengunjung untuk merencanakan perjalanan dan memastikan ketersediaan tempat duduk. Harga normal tur ini adalah Rp100.000. Namun, saat ini Open Top Tour Jakarta menawarkan tarif promo, yakni Rp50.000. Setiap sesi perjalanan memiliki kuota terbatas, yaitu hanya 30 tempat duduk. Oleh karena itu, pengunjung disarankan untuk segera memesan tiket mulai pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan.

Hal penting yang perlu diperhatikan saat kedatangan adalah pengunjung harus melakukan *check-in* di Gang Ratu Lounge, Ratu Plaza. Pengunjung dapat menunjukkan tiket digital kepada petugas agar mendapatkan gelang dan paket stiker bertema Open Top Tour Jakarta. Bagi yang ingin menitipkan barang bawaan, tersedia fasilitas sewa loker di depan Ratu Plaza dengan menggunakan aplikasi Paxel.

Open Top Tour Jakarta adalah cara sempurna untuk menikmati Jakarta dalam suasana yang berbeda. Dengan berbagai fasilitas eksklusif yang ditawarkan serta harga yang sangat terjangkau, tur ini menjadi salah satu pilihan wisata menarik yang patut dicoba untuk melihat Jakarta dari atas bus tingkat, merasakan atmosfer kota yang dinamis, dan menikmati pemandangan yang jarang didapatkan dari tempat lain. ■



Bus tingkat pada Open Top Tour Jakarta (Sumber: Dok. Transjakarta)

Transformasi Logo Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi resmi memperkenalkan logo barunya sebagai bagian dari penguatan identitas kelembagaan dan struktur organisasi. Transformasi ini ditetapkan melalui **Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-13.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Logo Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.**



Tali

melambangkan kekuatan dan stabilitas.

Bintang

melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus simbolisasi dari *guidance* atau arah panduan; harapan bahwa Kementerian selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan YME.

Pita Putih

melambangkan keterbukaan, kejujuran, dan transparansi dalam pelayanan.

Padi

melambangkan kehidupan yang sejahtera, adil, dan saling mendukung dalam komunitas yang harmonis.

Gerbang

menyimbolkan pengawasan dan keamanan masuk dan keluar di wilayah Republik Indonesia.

Bhumi Pura Wira Wibawa

adalah semboyan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang berarti 'Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa'.



Penerapan Paspor Elektronik di Seluruh Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasayaran
memberlakukan **penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100% secara bertahap di seluruh Indonesia hingga November 2025**. Penerapan e-paspor 100% tahap pertama dilakukan mulai tanggal 1 November 2024.

Wilayah Yang Sudah Menerapkan e-Paspor 100% (Hingga 30 April 2025)

1. Kantor Imigrasi **Jakarta Pusat**
2. Kantor Imigrasi **Soekarno-Hatta**
3. Kantor Imigrasi **Jakarta Selatan**
4. Kantor Imigrasi **Jakarta Barat**
5. Kantor Imigrasi **Jakarta Timur**
6. Kantor Imigrasi **Jakarta Utara**
7. Kantor Imigrasi **Tanjung Priok**
8. Kantor Imigrasi **Surabaya**
9. Kantor Imigrasi **Medan**
10. Kantor Imigrasi **Batam**
11. Kantor Imigrasi **Makassar**
12. Kantor Imigrasi **Ngurah Rai**
13. Kantor Imigrasi **Tangerang**
14. Kantor Imigrasi **Bitung**
15. Kantor Imigrasi **Semarang**
16. **Banten**
17. **Jawa Barat**
18. **Jawa Tengah**
19. **Daerah Istimewa Yogyakarta**
20. **Jawa Timur**
21. **Lampung**
22. **Bengkulu**
23. **Jambi**
24. **Sumatra Selatan**
25. **Sumatra Barat**

Wilayah yang Belum Menerapkan

1 Mei 2025

1. Bangka Belitung
2. Kepulauan Riau
3. Sumatra Utara
4. Riau
5. Aceh

1 Juni 2025

1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Tengah

1 Juli 2025

1. Kalimantan Timur
2. Kalimantan Selatan

1 September 2025

1. Bali
2. Nusa Tenggara Barat
3. Nusa Tenggara Timur

1 Oktober 2025

1. Maluku
2. Maluku Utara
3. Sulawesi Barat
4. Sulawesi Utara

1 November 2025

1. Papua
2. Papua Barat

5. Sulawesi Tengah
6. Sulawesi Tenggara
7. Sulawesi Selatan
8. Gorontalo



Tarif PNPB Paspor

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun
- Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama*
- Paspor hilang*
- Paspor rusak*

*di luar biaya permohonan paspor

Rp650.000

Rp950.000

Rp1.000.000

Rp1.000.000

Rp500.000



RIUNG MEDIA BEIJING: PROMOSI PELUANG INVESTASI INDONESIA

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing menggelar riung media (*media gathering*) bertajuk “Kabar Terkini dari Indonesia”. Forum strategis ini bertujuan memperkuat hubungan dengan media Tiongkok sekaligus menyebarkan informasi terkini mengenai kebijakan progresif pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Acara yang dihadiri oleh 60 jurnalis terkemuka dari berbagai platform media Tiongkok ini menjadi sarana diplomasi publik yang dijalankan oleh KBRI Beijing. Pada forum ini, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Duta Besar LBBP) untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun tampil sebagai pembicara kunci. Ia memberikan paparan mendalam tentang visi pembangunan

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam menyongsong tahun-tahun mendatang.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa para investor dan mitra potensial di Tiongkok mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai berbagai peluang yang ditawarkan Indonesia,” ujar Djauhari.

Selain Djauhari, para atase teknis dan koordinator fungsi KBRI Beijing turut menyampaikan informasi detail mengenai kebijakan-kebijakan spesifik dari kementerian dan lembaga terkait yang dirancang untuk mendukung perekonomian nasional dan menarik investasi asing. Penjelasan mengenai *golden visa* dan fasilitas keimigrasian lainnya oleh Atase Imigrasi KBRI Beijing

Herawan Sukoaji yang disampaikan dalam bahasa Mandarin mendapat perhatian khusus dari para jurnalis.

Melalui riung ini, pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan berbagai sektor investasi yang menjanjikan, termasuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), energi terbarukan, manufaktur maju, produksi pangan, infrastruktur digital, pertambangan, serta farmasi dan alat kesehatan. Data investasi yang disampaikan dalam acara ini menunjukkan tren positif dengan Tiongkok menjadi salah satu investor utama di Indonesia.

Berdasarkan data Kepabeanan Tiongkok (GACC), sebagai mitra dagang terbesar Indonesia pada 2024, total nilai perdagangan Tiongkok mencapai 147,78 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar



Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun saat memaparkan Kabar Terkini dari Indonesia di hadapan 60 orang perwakilan jurnalis Tiongkok (Sumber: kemlu.go.id)

6,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain sektor perdagangan, arus investasi dari Tiongkok ke Indonesia juga mengalami peningkatan. Realisasi investasi Tiongkok tercatat 8,1 miliar dolar AS (naik 9,4%) yang didukung oleh kontribusi investasi yang signifikan dari Hong Kong sebesar 8,2 miliar dolar AS.

Selain sektor ekonomi, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok juga tecermin dalam beragam sektor lainnya. Contohnya di bidang pariwisata, Indonesia mencatatkan ada 1,1 juta kunjungan wisatawan Tiongkok pada 2024. KBRI Beijing memang aktif

mempromosikan destinasi wisata Indonesia, khususnya konsep “*Bali and beyond*” yang menawarkan kekayaan alam dan budaya. Kerja sama pendidikan dan kebudayaan pun tak kalah pentingnya; terdapat perkembangan positif dalam pertukaran budaya dan pendirian pusat kebudayaan Indonesia di berbagai universitas di Tiongkok.

Mengakhiri acara, Duta Besar LBBP Djauhari Oerاتمangun menyampaikan harapannya agar perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dapat memperkuat kemitraan

strategis komprehensif kedua negara di berbagai sektor. Beliau juga menekankan peran penting media dalam mendukung kerja sama yang saling menguntungkan ini.

“Memanfaatkan momentum perayaan 75 tahun hubungan diplomatik, kami berharap kemitraan strategis komprehensif kedua negara akan makin intensif dengan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai sektor. Media akan selalu menjadi mitra yang sangat penting dalam perjalanan ini,” pungkasnya. ■

INDONESIA SOROTI IMPLEMENTASI ABTC VIRTUAL DI APEC SOM 1 2025 KOREA SELATAN

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Republik Indonesia (RI) tampil aktif dalam The First APEC Senior Officials’ Meeting (SOM 1) and Related Meetings 2025. Pertemuan ini merupakan forum penting bagi 21 negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dalam memperkuat kerja sama regional, termasuk dalam isu mobilitas bisnis dan inovasi sistem imigrasi.

SOM 1 and Related Meetings 2025 menjadi platform bagi para pejabat senior untuk membahas prioritas APEC 2025, termasuk potensi FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific), akal imitasi (AI), dan perubahan demografi. Berfokus pada tema “*Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper*” pertemuan ini berlangsung pada 26–28 Februari 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

Dalam kelompok kerja Business Mobility Group (BMG), Indonesia menyoroti keberhasilan implementasi APEC Business Travel Card (ABTC) Virtual sejak 2021 serta mendorong adopsi penuh digitalisasi oleh seluruh anggota. Indonesia juga mengusulkan peningkatan transparansi dalam proses aplikasi kartu ABTC, seperti dengan penambahan foto dan nama perusahaan pemohon, pengembangan sistem berbasis keamanan, dan evaluasi berkala.



Delegasi SOM 1 and Related Meetings pada 26–28 Februari 2025 di Gyeongju, Korea Selatan (Foto: Dok. Imigrasi KBRI Seoul)

Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan APEC Scientist Card dan menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam pemanfaatan ABTC (tercatat pada 2024, 30% penerima ABTC adalah perempuan profesional). Inisiatif Indonesia pun mendapat apresiasi dari berbagai negara anggota, termasuk Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Cile, dan Thailand. Indonesia bahkan berkesempatan memamerkan inovasi keimigrasiannya, seperti

penerapan *autogate*, pembentukan *cyber unit*, serta rencana peluncuran desain baru paspor RI berfitur keamanan canggih pada Agustus 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-80 RI.

Seluruh hasil SOM 1 akan dibahas lagi dalam SOM 2 di Pulau Jeju pada Mei 2025 serta SOM 3 dan Ministerial Meeting pada Agustus 2025 mendatang di Incheon. Sementara itu, SOM 2025 terakhir akan diadakan di Gyeongju pada minggu pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC. ■

AUTOGATE INDONESIA: APA KATA MEREKA?

Saya sudah dua kali menggunakan *autogate* di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dua-duanya lancar, baik keberangkatan maupun kedatangan. Tidak ada kendala dan cepat sekali, jadi mempermudah [saya] saat yang lain antre panjang di konter imigrasi manual. *Autogate* di Terminal 2F juga baru dan bagus banget. Sekarang, tiap berangkat ke luar negeri, pasti bakal pakai *autogate* [karena] *seamless* (mulus) itu!

Alfi Maula Mustafid, mahasiswa



”

Autogate sangat mempermudah verifikasi paspor saya, menghilangkan antrean panjang yang sering terjadi. Dengan *autogate*, saya cukup menghadap kamera dan memindai paspor. Sekarang, bepergian ke luar negeri jadi jauh lebih praktis dan tidak *ribet* lagi.

Jeffry Eng Lie Simbolon, pebisnis



Saya mengapresiasi sebesar-besarnya layanan *autogate* dari Imigrasi Indonesia. Prosesnya sangat cepat, efisien, dan modern! Hanya dengan *scan* (pindai) paspor, lihat ke kamera, lalu selesai. Semuanya berlangsung dalam hitungan detik. Luar biasa!

Selama ini saya hanya melihat cuplikan tentang *autogate* di media sosial resmi Imigrasi. Setelah mencobanya sendiri, saya benar-benar merasakan kemajuan luar biasa pelayanan imigrasi kita. Rasanya seperti berada di bandara internasional kelas dunia.

Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh pihak yang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang makin modern.

Salut dan sukses terus untuk Imigrasi Indonesia!

Evina Puspita, karyawan swasta



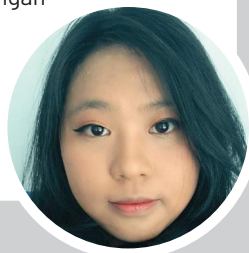
Kaget [melihat] imigrasi sekarang sudah [pakai] *autogate*. Bangga sekali karena Imigrasi Indonesia tidak mau kalah dengan negara lain. [Saat] pertama kali coba, mungkin banyak kendalanya. Namun, sekarang sudah banyak kemajuan; sekali pindai, masuk, pindai sidik jari, dan selesai! Hanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Walaupun ada kendala, petugas imigrasi dengan senyum dan sabar sigap memandu. Terima kasih, Imigrasi!

Mikael Ezra Manuelputra, asisten insinyur TI di Taiwan

Jauh sebelum ada *autogate*, melihat antrean imigrasi itu seperti melihat antrean sembako: panjang mengular, *tapi* butuh. Kalau ada yang *nyalip* antrean, rasanya kesal setengah mati. Awalnya saya agak takut [untuk] pakai *autogate* karena paspor saya belum elektronik, jadi akhirnya tetap lewat petugas imigrasi, *deh*.

Sejak ada *autogate*, selamat tinggal antrean, selamat tinggal repot. Hanya dengan pindai paspor dan menghadap kamera (jangan lupa buka masker, topi, dan kacamata), bisa langsung jalan, *deh*. Tidak sampai 5 menit dan *gate*-nya banyak, jadi tidak ada lagi "antrean sembako" di bandara.

Arti Murnandari, pembudi daya perairan



“



Sebenarnya kami sudah banyak mendengar tentang *autogate* di Bandara Soekarno-Hatta, *tapi* tetap merasa waswas karena baru pertama kali. Sebelumnya, kami sudah cari tahu cara pakai *autogate* melalui media sosial Imigrasi.

Setelah masuk area imigrasi, kami langsung menuju *autogate*. Ternyata pakai *autogate* sangat mudah. Kami tinggal pindai paspor dan wajah. Dalam beberapa detik, pintu *autogate* otomatis terbuka. Pengalaman yang berkesan sekali bagi kami yang baru pertama kali menggunakan *autogate*.

Fitri Indriana, ibu rumah tangga



Pertama kali pakai *autogate* itu *pas flight* (penerbangan) pertama kali ke Abu Dhabi. Petugasnya ramah dan cekatan, *kok*. Mereka sigap *ngebantu* siapa *aja* yang kesusahan pakai *autogate*. Terus, praktis juga dan *nggak pake* lama. *Syukaaa, deh. Good job*, Imigrasi!

Fatimah Wiranata



Saya senang bisa merasakan langsung transformasi dari pemeriksaan imigrasi manual menjadi *autogate*. Dulu, waktu pertama kali mau ke Kuala Lumpur, paspor saya masih di-*stamp* (stempel) manual di Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa hari setelah pulang, saya agak kaget karena di kedatangan Terminal 3 sudah ada *autogate*! Jujur, itu jauh lebih efisien dan cepat.

Dalam perjalanan ke luar negeri saya baru-baru ini, ternyata *autogate* sudah ada di keberangkatan dan kedatangan. Setelah ganti ke e-paspor, [saya] jadi agak kangen paspor lama karena sudah *nggak* dapat stempel dari imigrasi lagi. *Tapi, it's OK*, demi pelayanan imigrasi yang makin maju dan modern.

Muhamad Alfin Yulianto, pekerja lepas



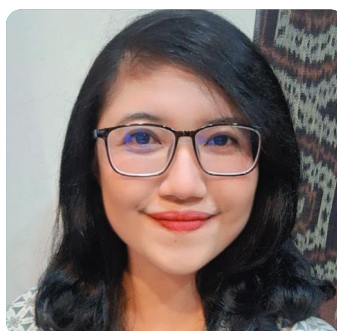
Pengalaman pertama saya pakai *autogate* itu waktu umrah, dan jujur, saya kagum dan *excited banget*! Bayangkan saja, itu pertama kalinya saya ke Jakarta sekaligus luar negeri. Terus, saya lihat ada fitur *autogate* yang menurut saya luar biasa.

Saat itu, saya dan jemaah lain dipersilakan lewat pintu *autogate*. Awalnya saya *nggak* tahu apa-apa, *tapi* ternyata prosesnya gampang *banget*. Kita cuma perlu berdiri di *footstep* (pijakan kaki) kuning, buka halaman biodata paspor, lalu pindai di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu, hadapkan wajah ke layar dan tunggu sebentar sampai lampu hijau menyala dan pintu terbuka. Kalau lampunya merah, berarti belum berhasil dan harus coba lagi.

Untungnya, saya cuma coba sekali dan langsung berhasil. Menurut saya, *autogate* ini efisien *banget* untuk pengguna dan juga memudahkan petugas imigrasi dalam pemeriksaan. Prosesnya cuma hitungan detik, jadi *nggak* perlu antre lama.

Semoga ke depannya ada fitur-fitur baru lagi yang makin memudahkan semua orang.

Nadine Dhiya Restu, mahasiswa



Saya pertama kali mencoba *autogate* saat akan berangkat ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi pada tahun lalu. Saya sudah siap-siap mengantre panjang di imigrasi. Namun, petugas bandara tiba-tiba mengarahkan saya ke *autogate*. Awalnya ragu, *tapi* ternyata prosesnya cepat dan mudah. Cukup memindai paspor dan wajah, lalu pintu langsung terbuka. Rasanya efisien dan praktis sekali. *Autogate* benar-benar memangkas waktu pemeriksaan, membuat pengalaman di bandara jauh

lebih nyaman dan menyenangkan.

Saya sangat terkesan dengan kemudahan ini.

Maria, pengajar musik





Judul Buku : *Best Self: Cara Efektif Memaksimalkan Potensi Diri*
 Penulis : Mike Bayer
 Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
 Tahun Terbit : Oktober 2023 (cetakan kedua)
 Halaman : 350 halaman

5 LANGKAH PRAKTIS MENEMUKAN VERSI TERBAIK DIRIMU

Setiap orang punya potensi luar biasa dalam dirinya, tetapi sering terhalang oleh kebiasaan dan pola pikir yang membatasi. Dalam buku ini, penulis memberikan contoh nyata dari pengalamannya sebagai pelatih pribadi.

■ Penulis: Fipit Fatimah, Bima Ahmad

Best Self: Cara Efektif Memaksimalkan Potensi Diri adalah buku motivasi yang ditulis oleh Mike Bayer, seorang pelatih pribadi dan ahli dalam pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membantu pembaca mengenali dan mengatasi hambatan mental yang sering menghalangi seseorang dalam mencapai versi terbaik dirinya.

Bayer menekankan bahwa potensi setiap orang sudah ada dalam diri masing-masing. Namun, untuk mencapai versi terbaik, seseorang harus berani mengubah kebiasaan dan pola pikir yang tidak mendukung.

Aspek Penting dalam Pengembangan Diri

1. Mengidentifikasi "Best Self"

Bayer mengajak pembaca untuk mengenali siapa diri mereka sebenarnya dengan menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Menemukan "best self" berarti memahami nilai-nilai inti yang dapat menjadi pendorong bagi perubahan positif.

2. Mengatasi Hambatan Mental

Salah satu kunci dalam mencapai potensi terbaik adalah mengatasi pikiran dan kebiasaan negatif. Bayer memberikan panduan

untuk menghentikan pola pikir yang merugikan serta menggantinya dengan yang lebih positif.

3. Membangun Kebiasaan yang Mendukung

Bayer menekankan pentingnya perubahan kebiasaan. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung perkembangan diri, seseorang bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Menjaga Komitmen

Buku ini mengajarkan pentingnya konsistensi. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan dedikasi dan komitmen.

5. Mengelola Emosi dan Stres

Tekanan hidup adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana kita mengelolanya sangat menentukan kualitas hidup kita. Bayer memberikan tip mengelola emosi, stres, serta bagaimana menjaga keseimbangan hidup.

(+) Kelebihan Buku

Buku ini dilengkapi dengan latihan dan refleksi yang dapat langsung diterapkan, membantu pembaca yang ingin mengalami perubahan nyata dalam hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana, Bayer berhasil menyampaikan pesan penting

tanpa membuat pembaca merasa terintimidasi oleh konsep-konsep psikologi yang kompleks.

Selain itu, Bayer sering menggunakan contoh dari pengalamannya sendiri sebagai pelatih pribadi. Ia juga menceritakan kisah sukses klien-kliennya yang telah berhasil mengubah hidup dan memberikan inspirasi dan kepercayaan pada pembaca.

(-) Kekurangan Buku

Bagi pembaca yang sudah terbiasa dengan buku-buku pengembangan diri atau psikologi yang lebih mendalam, buku ini mungkin terasa kurang menawarkan wawasan teoretis. Buku ini lebih mengutamakan pengaplikasian yang praktis daripada teori berdasarkan kajian ilmiah.

Beberapa konsep yang dibahas pun terasa terlalu umum dan kurang spesifik. Sebagian pembaca mungkin perlu penyesuaian lebih lanjut untuk menerapkannya.

Kesimpulan

Buku karya Mike Bayer ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengenali diri lebih dalam dan meraih tujuan hidup secara efektif. Dengan pendekatan praktis dan motivasional, buku ini menjadi panduan yang berguna untuk memulai perjalanan pengembangan diri.

Buku ini layak dibaca untuk pemula dalam pengembangan diri meskipun kurang cocok bagi yang mencari analisis teoretis mendalam. ■

MENEMUKAN "BEST SELF" BERARTI MEMAHAMI NILAI-NILAI INTI YANG DAPAT MENJADI PENDORONG BAGI PERUBAHAN POSITIF.



Momen doorstop setelah pelaksanaan konferensi pers (Foto: Tommy Ariyanto)



Pelepasan peserta Imirun 2025 di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta (Foto: Jimmy Asmoro)



Konferensi pers mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh para WNA di Batam (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Penyerahan bantuan makan siang oleh Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam kepada masyarakat di sekitar Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: I Ketut Adi Wardana)



Pengarahan media (media briefing) yang menjangkau para pemimpin redaksi dari berbagai media nasional yang menjadi agenda tahunan Humas Imigrasi (Foto: Jimmy Asmoro)



Penghormatan kepada arwah pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam dalam acara pembukaan Kopdar Humas Imigrasi di hotel AYANA Midplaza Jakarta (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam saat pengarahannya kepada kepala unit pelaksana teknis keimigrasian (Foto: Tommy Ariyanto)



Pengarahan kepada kepala unit pelaksana teknis keimigrasian oleh Plt. Dirjen Imigrasi (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)



Penulisan catatan setelah upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)



Serah terima jabatan (Plt.) Dirjen Imigrasi dari Silmy Karim kepada Saffar M. Godam (Foto: Arif Rahman Suryaman)

INI DIA KANAL INFORMASI DITJEN IMIGRASI



Oleh: @paperloova

Layanan Urus Paspor Kolektif

di Kantor, Kampus, Komunitas, atau Kompleks Perumahan Kamu

Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor imigrasi terdekat



**KAMU
DI SITU AJA,
BIAR KAMI YANG
DATANG
KE SANA!**

Paspor Kamu

Hilang/Rusak?

Dokumen Persyaratan

- E-KTP
- Kartu keluarga
- Akta lahir/ijazah/buku nikah
- Paspor lama (untuk paspor rusak)
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk paspor hilang)



Prosedur

- ▶ Datang langsung ke kantor imigrasi penerbit paspor tanpa harus daftar melalui aplikasi M-Paspor.
- ▶ Proses urus paspor kembali wajib melalui tahapan berita acara pemeriksaan (BAP) di kantor imigrasi.

Biaya Beban/Denda



Paspor Hilang
Rp1.000.000*



Paspor Rusak
Rp500.000*

*belum termasuk biaya pembuatan paspor